

**KAJIAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008**



**KERJASAMA
BPS PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008**



Tim Penyusunan Penulisan :

**Kajian Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008**

Pengarah : M. Haslani Haris

Editor : M. Haslani Haris
Yohannes H. Toruan

Penulis : Dyah Anugrah K
Faharuddin
Renny Veronica

Pengolah Data/Penyiapan Draft : Faharuddin
Renny Veronica
Lia Nurliana

Diterbitkan oleh
Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Selatan
bekerjasama dengan
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan



KATA SAMBUTAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyambut gembira dengan diterbitkannya publikasi Kajian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008. Publikasi ini merupakan hasil kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan.

Dari data/informasi yang disajikan dalam publikasi ini diharapkan Pemerintah Daerah dan juga konsumen data secara umum dapat mengetahui garis besar gambaran tentang pencapaian program pembangunan di Sumatera Selatan. Diharapkan juga dengan adanya informasi ini dapat memberikan banyak manfaat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka membuat suatu perencanaan pembangunan di bidang peningkatan pemberdayaan manusia. Selain itu, publikasi ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan program pembangunan selanjutnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini kami ucapkan terima kasih dan kepada pihak BPS semoga kerja sama ini dapat ditingkatkan lagi di masa yang akan datang, khususnya dalam upaya menyediakan data/informasi yang dapat dijadikan salah satu dasar penentuan kebijakan Pemerintah Daerah.

Palembang, Oktober 2008

 Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 



YOHANNES H. TORUAN
Pembina Tk. I
NIP. 010 222 826

KATA PENGANTAR

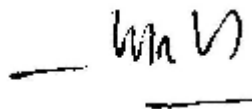
Terbitnya publikasi Kajian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 ini merupakan salah satu upaya bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memberikan gambaran secara garis besar tentang capaian program pembangunan di Sumatera Selatan. Informasi yang disajikan antara lain adalah Indeks Harapan Hidup, Indeks Pengetahuan (Indeks Melek Huruf dan Indeks Lamanya Sekolah), dan Indeks Daya Beli Masyarakat beserta tinjauan permasalahannya.

Penyajian publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan masukan sebagai bahan evaluasi kepada Pemerintah Daerah melalui BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan aspek peningkatan pembangunan manusia di Sumatera Selatan.

Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terbitnya publikasi ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saran dan kritik dari pembaca sangatlah kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang.

Akhirnya, semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi para konsumen data.

Palembang, Oktober 2008
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN



M.HASLANI HARIS, MA
NIP. 340004309

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan.....	2
1.3 Sumber Data.....	2
BAB 2 KONSEP DAN PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA.....	4
2.1 Konsep Pembangunan Manusia	4
2.2 Menerjemahkan Konsep Pembangunan	6
BAB 3 METODOLOGI PENGHITUNGAN.....	8
3.1 Indeks Pembangunan Manusia.....	8
3.1.1 Umur Harapan Hidup.....	8
3.1.2 Tingkat Pendidikan.....	9
3.1.3 Standar Hidup Layak	9
3.2 Penghitungan IPM.....	9
BAB 4 KAJIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA SUMATERA SELATAN.....	12
4.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan.....	12
4.2 Perkembangan Komponen IPM di Sumatera Selatan.....	14
4.2.1 Aspek Harapan Hidup (AHH)	14
4.2.2 Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf.....	15
4.2.3 Daya Beli.....	16
4.3 Pembangunan Kapabilitas Dasar.....	17
4.3.1 Pencapaian Program Pendidikan.....	18
4.3.1.1 Angka Melek Huruf.....	18
4.3.1.2 Angka Partisipasi Sekolah.....	20
4.3.2 Akses Pada Layanan Kesehatan Dasar.....	21
4.3.2.1 Pemanfaatan Fasilitas Dasar Kesehatan.....	21

	4.3.2.2 Layanan Kesehatan reproduksi.....	22
	4.3.2.3 Status Gizi Balita.....	23
BAB 5	PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT KABUPATEN/ KOTA DI SUMATERA SELATAN.....	25
	5.1 Capaian IPM Kabupaten/Kota.....	25
	5.2 Status Pembangunan Kabupaten/Kota	27
	5.3 Perkembangan Komponen IPM Kabupaten/Kota.....	28
	5.3.1 Angka Harapan Hidup (AHH).....	28
	5.3.2 Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama sekolah.....	30
	5.3.3 Daya Beli.....	32
BAB 6	PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEMISKINAN.....	33
	6.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan 2005-2007.....	34
	6.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2007-Maret 2008.....	34
	6.3 Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2007-Maret 2008.....	36
	6.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.....	36
BAB 7	PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA.....	39
	7.1 Konsep Ketenagakerjaan.....	39
	7.2 Perkembangan Variabel-Variabel Ketenagakerjaan.....	41
	7.2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	41
	7.2.2 Pengangguran.....	45
	7.2.3 Distribusi sektoral Penyerapan Tenaga Kerja.....	51
	7.2.4 Jenis Pekerjaan/Jabatan.....	53
	7.2.5 Status Pekerjaan.....	54
	7.3 Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja.....	55
BAB 8	PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KETAHANAN PANGAN.....	58
	8.1 Konsep Dasar Ketahanan Pangan.....	58
	8.2 Pangsa Pengeluaran Pangan.....	60
	8.3 Konsumsi Energi dan Protein.....	61
	8.4 Pembangunan Manusia dan Ketahanan Pangan.....	64
BAB 9	KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN.....	71
	9.1 Kesimpulan.....	71
	9.2 Implikasi Kebijakan.....	73
	LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1	Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM.....	10
Tabel 4.1	IPM Propinsi Sumatera Selatan 2005-2007.....	13
Tabel 4.2	Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur dan Kemampuan Membaca dan Menulis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007	19
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Keatas Menurut Quantil Pengeluaran Perkapita dan Kemampuan Membaca dan Menulis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007.....	19
Tabel 4.4.	Disparitas APS Antar Kabupaten Kota Tahun 2007.....	20
Tabel 4.5	Persentase Penolong Kelahiran Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2007.....	22
Tabel 4.6	Persentase Balita Gizi Buruk dan Kurang di Propinsi Sumatera Selatan 2003 dan 2005.....	24
Tabel 5.1	Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dengan Urutan IPM Tertinggi dan Terendah, 2005-2007.....	26
Tabel 5.2	Reduksi <i>Shortfall</i> Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2005-2007.....	27
Tabel 5.3	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2005 – 2007.....	29
Tabel 5.4	Angka Kematian Bayi (IMR) dan Angka Kematian Ibu (MMR) Kabupaten/ Kota Tahun 2004.....	29
Tabel 6.1	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2007-Maret 2008.....	35
Tabel 6.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2007- Maret 2008	37
Tabel 7.1	Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 dan 2007	42
Tabel 7.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006-2007.....	43
Tabel 7.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007.....	44

Tabel 7.4	Jumlah Penduduk yang Menganggur Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Sumatera Selatan Tahun 2006 dan 2007.....	46
Tabel 7.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Sumatera Selatan Tahun 2006 dan 2007.....	46
Tabel 7.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007.....	48
Tabel 7.7	Tingkat Pengangguran Terdidik Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007.....	49
Tabel 7.8	Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007.....	50
Tabel 7.9	Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006-2007.....	52
Tabel 7.10	Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007.....	53
Tabel 7.11	Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 dan 2007.....	54
Tabel 7.12	Persentase Penduduk Yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 dan 2007.....	55
Tabel 7.13	<i>Pearson Correlation</i> IPM dan Persentase Pekerja Sektor Formal di Sumatera Selatan, Tahun 2007.....	57
Tabel 8.1	Perkembangan Pangsa Pengeluaran Pangan Menurut Daerah Tempat Tinggal, Sumatera Selatan 1996 – 2007.....	61
Tabel 8.2	Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein Per Hari Per Kapita, Sumatera Selatan 1996 – 2007.....	62
Tabel 8.3	Ketahanan Pangan Tingkat Rumahtangga di Sumatera Selatan 2007: Pangsa Pangan dan Kecukupan Energi.....	63
Tabel 8.4	Beberapa Indikator Ketahanan Pangan dan IPM Sumatera Selatan 1996 – 2007.....	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2007.....	14
Gambar 4.2. Angka Melek Huruf Provinsi Sumatera Selatan 2005-2007.....	15
Gambar 4.3 Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2007.....	16
Gambar 4. 4 Daya Beli Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan 2005-2007.....	17
Gambar 4.5 .Angka Kunjungan ke Fasilitas Kesehatan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2007.....	22
Gambar 6.1 Hubungan Antara IPM dan Persentase Penduduk Miskin, Sumatera Selatan.....	38
Gambar 7.1 Diagram Ketenagakerjaan.....	40
Gambar 7.2 Tingkat Pengangguran Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kota-Desa Tahun 2007.....	47
Gambar 7.3 Sumatera Selatan: IPM dan Persentase Pekerja Sektor Formal, 2007.....	56
Gambar 8.1 Diagram Peranan Pembangunan Manusia dalam Kerangka Pemantapan Ketahanan Pangan	66
Gambar 8.2 Hubungan Antara IPM dan Pangsa Pangan, Sumatera Selatan.....	69
Gambar 8.3 Hubungan Antara IPM dan Konsumsi, Sumatera Selatan.....	69
Gambar 8.4 Hubungan Antara IPM dan Konsumsi Protein, Sumatera Selatan.....	70

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara parsial, keberhasilan kinerja pembangunan dapat dinilai seberapa besar persoalan paling mendasar dapat diatasi, seperti angka kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Persoalan ini menjadi *concern* bagi penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran dapat digunakan namun barangkali tidak standar karena tidak bisa dibandingkan antar daerah atau negara. Maka Badan Perserikatan Bangsa-bangsa menetapkan suatu ukuran standar, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*. Indeks ini dibentuk dari empat indikator, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Indikator Angka Harapan Hidup mempresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.

Dengan begitu luasnya cakupan dari pembangunan manusia, maka peningkatan IPM sebagai manifestasi pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan (*enlarging the choices of people*). Untuk meningkatkan IPM, tidak hanya semata tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Sebab pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup, yaitu pemerataan pembangunan.

Pemerataan pembangunan diperlukan untuk menjamin semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Diketahui beberapa faktor penting dari hasil pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya. Umumnya semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu.

Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara terbukti bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia harus diperhatikan dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Sebagai contoh Korea Selatan yang konsisten melaksanakan dua hal tersebut sukses dalam meningkatkan pembangunan manusianya.

Pemerintah saat ini tampaknya sangat *concern* dengan pembangunan manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu alokator dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan daerah (*fiscal gap*). Alokator lainnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan indeks kemahalan konstruksi. Seyogianya daerah dengan IPM rendah secara perlahan dapat mengejar ketertinggalannya, karena memperoleh aloasi dana yang berlebih. Meski demikian, hal itu masih sangat tergantung dengan strategi pembangunan yang dijalankan.

Dengan demikian cukup menarik melihat pencapaian pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini di Propinsi Sumatera Selatan. Selain itu menarik juga untuk melihat perkembangan masing-masing komponen dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM.

1.2. Tujuan Penulisan

Secara umum kajian ini akan menyajikan data dan analisa IPM selama 2005-2007. Data IPM secara lengkap dapat dilihat pada tabel lampiran. Selain itu juga akan dilakukan analisis perkembangan komponen dari IPM. Secara khusus kajian ini bertujuan:

1. Menyajikan perkembangan IPM dan komponennya.
2. Menyajikan analisis perkembangan IPM antar kabupaten kota maupun komponennya.
3. Menyajikan korelasi antara IPM dengan Kemiskinan
4. Menyajikan korelasi IPM dengan Ketenagakerjaan
5. Menyajikan korelasi antara IPM dengan Ketahanan Pangan

1.3. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan adalah Susenas Kor, Susenas Modul dan Indeks Harga Konsumen. Data Susenas Kor digunakan untuk menghitung tiga indikator pembentuk

IPM. Ketiga indikator tersebut adalah Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata lama sekolah (MYS), dan Angka Harapan Hidup (e^0). Sedangkan indikator lainnya adalah daya beli atau PPP (*purchasing power parity*). Untuk indikator ini data yang digunakan adalah Susenas Modul Konsumsi yang didasarkan pada 27 komoditi.

BAB 2

KONSEP DAN PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

2.1. Konsep Pembangunan Manusia

"Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana. Tetapi seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. "

Kalimat di atas merupakan kalimat pembuka pada *Human Development Report* (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. Kalimat ini dengan jelas menekankan pesan utama yaitu pembangunan yang berpusat pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Berbeda dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia, pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan.

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Diantara pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Untuk menghindari salah pengertian, perbedaan antara cara pandang pembangunan manusia terhadap pembangunan dengan pendekatan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumberdaya manusia, kesejahteraan rakyat dan pemenuhan kebutuhan dasar perlu diperjelas. Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi lebih mementingkan pada peningkatan Produk Nasional Bruto (PNB) daripada memperbaiki kualitas

hidup manusia. Pembangunan sumberdaya manusia cenderung memperlakukan manusia alat bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai penerima bukan sebagai agen dari suatu perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan kebutuhan dasar terfokus pada penyediaan barang-barang dan jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan Manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat – pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural – dari sudut pandang manusia.

Paradigma pembangunan manusia mengandung empat komponen utama:

- Ø Produktifitas. Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan manusia.
- Ø Pemerataan. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan hingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang tersedia.
- Ø Keberlanjutan. Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua bentuk sumber daya ; fisik, manusia, alam harus dapat diperbaharui.
- Ø Pemberdayaan. Pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukannya semata-mata untuk semua orang. Semua orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

(HDR 1995, hal 12).

Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas, dan produktifitas manusia akan meningkat sehingga mereka akan menjadi agen pertumbuhan yang efektif. Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan hasil-hasilnya.

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi tetapi tidak anti terhadap pertumbuhan. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi

bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi adalah alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Perhatian pembangunan manusia tidak hanya terfokus pada laju pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada aspek pendistribusiannya. Jadi bukan hanya masalah berapa besarnya, tetapi juga pertumbuhan yang seperti apa.

2.2. Menerjemahkan Konsep Pembangunan

Dimasukkannya konsep IPM ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sama sekali tidak berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, yang antara lain bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mencegah kerusakan lingkungan. Perbedaannya adalah bahwa dari sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut di atas diletakkan dalam kerangka untuk mencapai tujuan utama, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia.

Konsep pembangunan manusia juga telah menarik perhatian para pembuat kebijakan di Indonesia. Dibandingkan dengan pendekatan ekonomi tradisional yang lebih memperhatikan peningkatan produksi dan produktivitas, pembangunan manusia dianggap lebih mendekati tujuan utama pembangunan. IPM juga menyajikan ukuran kemajuan pembangunan yang lebih memadai dan lebih menyeluruh daripada ukuran tunggal pertumbuhan PDB per kapita.

Setelah pemerintah melimpahkan sebagian besar aktivitas pembangunan ke kabupaten/kota, sebagian besar pejabat daerah harus menghadapi tugas untuk meningkatkan pembangunan manusia di daerahnya. Apa yang harus mereka lakukan? Pertama, mereka harus memahami kaitan antara konsep pembangunan manusia dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari kebebasan menyatakan pendapat, untuk mencapai kesetaraan gender, untuk memperoleh pekerjaan, untuk menjaga gizi anak, untuk bisa membaca dan menulis. Indeks Pembangunan Manusia di lain pihak mempunyai cakupan yang lebih sempit. Meskipun IPM mencoba untuk mengukur tingkat pembangunan manusia, indeks ini hanya mampu mengukur sebagian saja. Hal ini disebabkan karena beberapa aspek kehidupan sangat sulit diukur atau dikumpulkan datanya. Bahkan sangat sulit memadukan data dari berbagai aspek yang berbeda menjadi satu indeks tunggal.

Oleh karenanya daerah harus lebih memfokuskan diri pada konsep pembangunan manusia secara luas serta penerapan prinsip-prinsip utamanya, daripada hanya memfokuskan pada indeks semata. Artinya, dalam aspek pekerjaannya, pejabat dan pegawai daerah harus mengutamakan manusianya, meletakkan manusia bukan sebagai alat pembangunan tetapi sebagai tujuan utama pembangunan. Misalnya, daripada meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat hanya untuk menyediakan tenaga kerja yang lebih baik atau meningkatkan perekonomian, selayaknya pejabat dan pegawai daerah membantu masyarakat di daerahnya untuk menjalankan kehidupan yang lebih berarti dan memuaskan. Oleh karena itu semua kegiatan mulai dari pembangunan jalan atau pemberian lisensi penambangan harus bertujuan untuk memperluas kesempatan dan pilihan yang dimiliki masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

BAB 3

METODOLOGI PENGHITUNGAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia menggunakan komponen dasar kualitas hidup. IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan/tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga) dan suatu standar hidup yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah).

3.1. Indeks Pembangunan Manusia

Sebagai ukuran kualitas hidup IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang, dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak, Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkair banyak faktor di dalamnya.

3.1.1. Umur Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan tidak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan untuk menghitung angka harapan hidup, yaitu anak lahir hidup (ALH), dan anak masih hidup (AMH). Dengan menggunakan paket program *Mortpack*, dipilih metode *Trussel* dengan model *West* yang sesuai dengan sejarah kependudukan dan kondisi Indonesia.

Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (175 negara di dunia). Pada komponen angka harapan hidup, angka tertingg sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun. Angka ini merupakan angka rata-rata umur terpanjang penduduk Swedia dan terpendek dari negara Siera leon di Afrika.

3.1.2. Tingkat Pendidikan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan angka melek huruf. Selanjutnya rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga.

Untuk penghitungan indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf dipakai 100 dan minimum 0.

3.1.3. Standar Hidup Layak

Selanjutnya dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan dengan formula Atkinson. Batas maksimum penghitungan daya beli adalah Rp 732 720,- dan batas minimum yang digunakan sampai tahun 1996 adalah Rp 300 000,-. Pada tahun 1996, penghitungan daya beli diubah dan disepakati menjadi Rp 360 000,- mengikuti kondisi pasca krisis ekonomi.

3.2. Penghitungan IPM

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

Dimana X_1 = lamanya hidup, X_2 = tingkat pendidikan, X_3 = tingkat kehidupan

Indeks X_1 , Indeks X_2 , dan Indeks X_3 dihitung dengan formula :

$$\text{Indeks } X(i,j) = (X_{(i,j)} - X_{(i-\text{min})}) / (X_{(i-\text{max})} - X_{(i-\text{min})})$$

Dimana : $X_{(i,j)}$: Indikator ke i dari daerah j ($i = 1,2,3$ $j = 1,2 \dots n$)

$X_{(i-\min)}$: Nilai minimum dari X_i

$X_{(i-\max)}$: Nilai maksimum dari X_i

Tabel 3.1 Nilai maksimum dan minimum dari setiap komponen IPM			
Komponen IPM	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Keterangan
Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	15	0	UNDP menggunakan <i>combined gross enrolment ratio</i>
Daya Beli	737,72	300 (1996) 360 (1999, 2002)	UNDP menggunakan PDB riil per kapita telah yang disesuaikan

Contoh penghitungan IPM

Contoh penghitungan IPM untuk Propinsi Sumatera Selatan tahun 2005 :

No	Indikator	Satuan	Nilai
1.	Angka Harapan Hidup	tahun	68,3
2.	Angka Melek Huruf	%	95,9
3.	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,5
4.	Pengeluaran Per Kapita yang telah Disesuaikan	Ribu Rp	610,3

Indeks harapan hidup :

$$(68,3 - 25) / (85 - 25) = 0,685 = 72,2 \%$$

Indeks tingkat pendidikan

- Indeks melek huruf

$$(95,9 - 0) / (100 - 0) = 0,96 = 96 \%$$

- Indeks Lama Sekolah

$$(7,5 - 0) / (15 - 0) = 0,5 = 50 \%$$

$$(2/3 \times 93 \%) + (1/3 \times 46 \%) = 80,7 \%$$

Indeks pendapatan

$$(610,3 - 360) / (732,72 - 300) = 57,8 \%$$

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :

$$(72,2 \% + 80,7 \% + 57,8 \%) / 3 = 70,2 \%$$

BAB 4

KAJIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROPINSI SUMATERA SELATAN

4.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Di Propinsi Sumatera Selatan

Pembangunan manusia adalah proses agar mampu memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik dan sebagainya. Konsep Indeks Pembangunan Manusia adalah mengukur pencapaian keseluruhan suatu negara. Dengan demikian IPM mengukur pencapaian kemajuan pembangunan sosial ekonomi. Bab ini akan membahas mengenai perkembangan pembangunan manusia di Sumatera Selatan selama 3 tahun terakhir ini, yaitu selama kurun waktu 2005-2007.

Dari Tabel 4.1 berikut terlihat bahwa secara umum pembangunan manusia di Sumatera Selatan selama tahun 2005-2007 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2005, IPM Sumatera Selatan tercatat 70,2. Seiring dengan membaiknya perekonomian, IPM secara perlahan naik mencapai 71,4 pada tahun 2007 atau naik sebesar 1.2 poin sehingga menempatkan Propinsi Sumatera Selatan pada peringkat ke 13.

Meningkatnya IPM selama periode 2005-2007 tidak terlepas dari membaiknya kinerja pemerintah yang ditunjukkan oleh peningkatan komponen IPM. Konkritnya, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita semuanya meningkat.

Peningkatan komponen IPM secara berturutan dari yang tertinggi adalah rata-rata lama sekolah (1.33 persen poin), kemampuan daya beli (1.19 persen poin), angka harapan hidup (1.02 persen poin), dan angka melek huruf (0.79 persen poin).

Tabel 4.1. IPM Propinsi Sumatera Selatan 2005-2007

Indikator	2005	2006	2007
Angka Harapan Hidup (tahun)	68,3	68,8	69,00
Angka Melek Huruf (persen)	95,9	96,6	96,7
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,5	7,6	7,6
Pengeluaran Perkapita(Rp. 000)	610,3	615,3	617,6
IPM	70,2	71,1	71,4
Reduksi Shortfall: 2005-2006		2.99	
2006-2007			1.06

Sumber : BPS Propinsi Sumsel

Angka IPM berkisar antara 0-100. Angka IPM suatu daerah memperlihatkan jarak yang harus ditempuh – *shortfall* – untuk mencapai nilai maksimum, yaitu 100. Angka ini dapat diperbandingkan antar daerah, dengan demikian, tantangan bagi semua daerah adalah untuk menemukan cara mengurangi nilai *shortfall* mereka (*reduksi shortfall*). Seperti yang terlihat pada Tabel 2 di atas *reduksi shortfall* pada periode 2005-2006 dan 2006-2007 bernilai positif dan mengalami penurunan dari 2.99 menjadi 1.06. Artinya percepatan IPM periode 2006-2007 melambat dibandingkan dengan periode 2005-2006. Apabila nilai *reduksi shortfall* bernilai negatif seperti yang terjadi pada *reduksi shortfall* nasional pada periode 1996-1999 (-2.19), maka berarti bahwa selama periode tersebut IPM semakin menjauh dari nilai idealnya atau dengan kata lain kualitas penduduk pada periode tersebut semakin memburuk.

Menurut UNDP, terdapat empat (4) kategori yang mengelompokkan status pembangunan suatu wilayah. Kategori tersebut meliputi status pembangunan rendah (IPM kurang dari 50.00), menengah bawah (IPM antara 50.00-65.99), menengah atas (IPM antara 66.00-79.99), dan tinggi (IPM lebih dari 80). Jika dilihat dari sisi pengkategorian IPM menurut skala tersebut, maka IPM Propinsi Sumatera Selatan secara berturut-turut dari tahun 2005-2007 sudah berada pada kategori menengah atas (70.2, 71.1, dan 71.4).

Pencapaian pembangunan manusia antar kabupaten/kota yang terdapat pada Tabel Lampiran 1 juga menunjukkan perbedaan yang semakin menyempit, yakni sebesar 8.6 poin

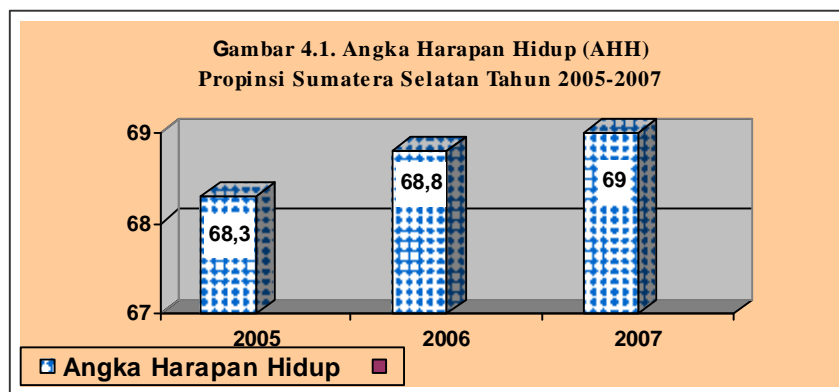
(74.94 untuk Kota Palembang dan 66.31 untuk Kabupaten Musi Rawas). Sementara pada tahun 2006 perbedaannya mencapai 8.7 poin (74.35 untuk Kota Palembang dan 65.65 untuk Kabupaten Musi Rawas). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di semua kabupaten / kota telah memperlihatkan kemajuan.

4.2. Perkembangan Komponen IPM di Propinsi Sumatera Selatan.

4.2.1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Aspek kesehatan juga merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya.

Angka harapan hidup adalah perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk secara umum. Gambar 4.1 memperlihatkan perkembangan AHH selama kurun waktu 2005-2007.



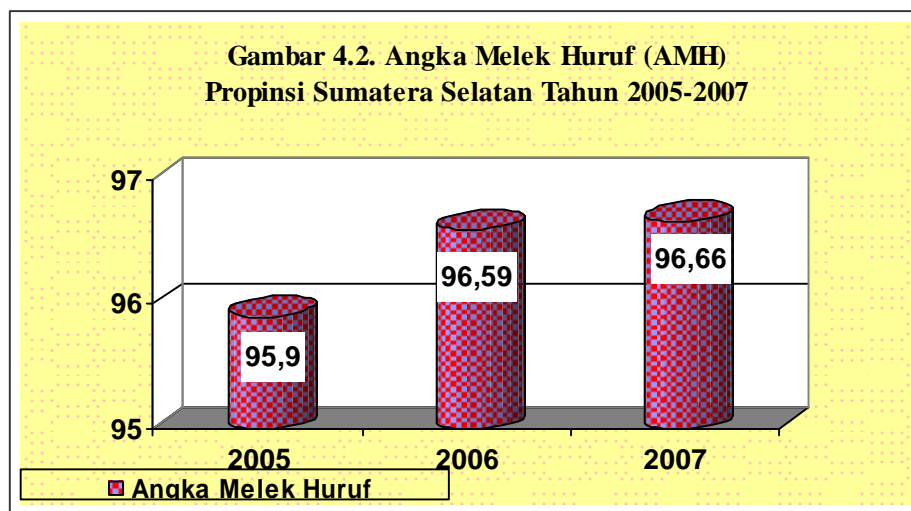
Pada gambar terlihat selama periode tersebut perkembangan AHH menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2005, AHH penduduk Sumatera Selatan hanya mencapai 68.3 tahun, sedikit di atas AHH nasional yang mencapai 68.1 tahun, namun pada tahun 2007 telah terjadi peningkatan yang cukup pesat menjadi 69.0 tahun. Jika di lihat antarkabupaten/kota, kabupaten yang paling rendah AHHnya pada tahun 2007 adalah Kabupaten Musi Rawas (64.14 tahun).

Pada periode yang sama, AHH tertinggi adalah AHH di Kota Prabumulih (70.71 tahun). Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2.

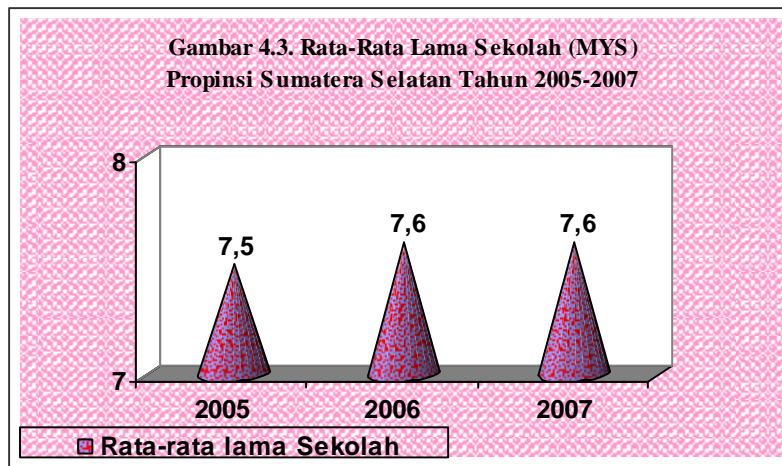
4.2.2. Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf (AMH)

Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam bentuk IPM adalah rata-rata lama sekolah atau mean years of schooling (MYS) dan angka melek huruf (AMH). Kedua indikator ini dihitung secara bersama-sama dengan pembobotan. AMH diberi bobot dua pertiga, sedangkan rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga.

Mengapa AMH diberi bobot lebih tinggi dari MYS karena ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan baca tulis penduduk dewasa. Kemampuan baca tulis tercermin dari data angka melek huruf, dalam hal ini persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca huruf latin dan lainnya. AMH penduduk berusia 15 tahun ke atas selama periode 2005-2007 menunjukkan perkembangan yang selalu meningkat, yaitu dari 95.9 persen menjadi 96.66 persen. Peningkatan yang cukup cepat terjadi pada periode 2005-2006, yaitu sebesar 0.69 persen poin dari 95.9 persen menjadi 96.59 persen. Pada periode berikutnya perkembangan AMH tampak mulai melambat sehingga perkembangan AMH pada periode 2006-2007 hanya meningkat sebesar 0.7 persen poin (lihat gambar 4.2). Jika dibandingkan menurut kabupaten/kota pada tahun 2007, persentase AMH tertinggi tercatat di kabupaten Muara Enim (98,8 %) dan terendah di kabupaten OKU Timur (94,6 %). Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3.



Indikator lainnya untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah atau MYS yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. MYS di Propinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 2005-2007 nyaris tidak terjadi peningkatan, yaitu dari 7.5 tahun menjadi 7.6 tahun. Ini berarti bahwa secara rata-rata penduduk Sumatera Selatan yang berusia 15 tahun ke atas hanya berpendidikan kelas 1 SMP saja



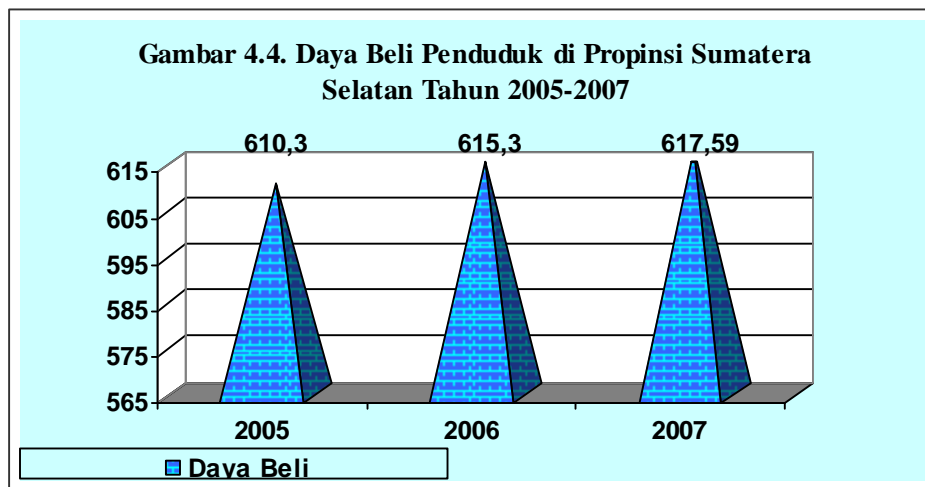
Jika dilihat menurut kabupaten/kota, rata-rata lama sekolah tertinggi tercatat di Kota Palembang, yaitu 9.9 tahun pada tahun 2007 yang berarti bahwa penduduk Kota Palembang rata-rata sudah mengenyam pendidikan sampai Sekolah Menengah Umum meskipun belum sampai tamat. Sebaliknya, rata-rata lama sekolah di kabupaten OKI merupakan yang terendah (6.7 tahun). Selengkapnya lihat Lampiran 3.

Terlihat di sini bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah atau MYS pada periode 2005-2006 sebesar 0.1 tahun, kemudian pada periode 2006-2007 tidak terjadi peningkatan. Jika dikaitkan dengan target minimal yang diusulkan UNDP (15 tahun), maka rata-rata pendidikan penduduk Propinsi Sumatera Selatan masih relatif tertinggal. Komitmen dan kesadaran semua pihak akan pentingnya tetap bersekolah perlu terus ditingkatkan agar tercipta SDM berkualitas.

4.2.3. Daya Beli

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah, karena

nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah berbeda. Perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah harus distandarisasi terlebih dahulu agar terbanding. Contoh, satu rupiah di Palembang memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Dengan standarisasi ini perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah menjadi terbanding.



Gambar 4.4 menunjukkan bahwa perkembangan kemampuan daya beli masyarakat Sumsel terus mengalami peningkatan. Peningkatan daya beli terlihat sejak tahun 2005-2007. Pada periode 2005-2006 daya beli masyarakat Sumsel meningkat secara cepat, dari Rp 610,3 ribu menjadi Rp 615,3 ribu. Namun pada periode selanjutnya, (2006-2007) peningkatannya terlihat melambat, dari Rp 615,3 ribu menjadi Rp 617,59 ribu. Jika dibandingkan antar kabupaten/kota, daya beli tertinggi tercatat di kota Palembang (Rp 616,8 ribu pada tahun 2005 dan Rp 625,44 ribu pada tahun 2007), sedangkan terendah di kabupaten Musi Rawas (Rp 592,80 ribu pada tahun 2007).

4.3. Pembangunan Kapabilitas Dasar

Salah satu tujuan penting dalam pembangunan adalah peningkatan kualitas hidup penduduk sehingga setiap individu mempunyai peluang untuk dapat berumur panjang dan sehat serta memiliki kesempatan untuk menambah pengetahuan dan pendidikan.

Dalam laporan ini capaian pada pendidikan tidak diukur dengan faktor intelegensia tetapi diukur dengan pendidikan formal yang dijalani. Selanjutnya pada faktor kesehatan diukur dengan angka harapan hidup serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

4.3.1. Pencapaian Program Pendidikan

Pendidikan merupakan syarat utama pembangunan kapabilitas dasar manusia. Melalui pendidikan seseorang dapat meningkatkan pengetahuan. Upaya peningkatan pendidikan yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan melalui Program Wajib Belajar 6 tahun dimulai pada tahun 1984 dan ditingkatkan dengan program wajib belajar pendidikan dasar tahun 1994. Untuk mengetahui kondisi terkini kualitas pendidikan di Sumatera Selatan., dibahas dua indikator utama pendidikan yaitu angka melek huruf (AMH) dan angka partisipasi sekolah (APS).

4.3.1.1 Angka Melek Huruf

Memiliki kemampuan membaca merupakan syarat penting bagi seseorang untuk dapat memahami kebutuhan dan agar dapat menerima pembaharuan. Dengan kata lain kemampuan baca tulis merupakan kemampuan minimal yang dibutuhkan seseorang untuk dapat menuju hidup sejahtera.

Secara umum penduduk usia 10 tahun ke atas yang sudah melek huruf adalah sekitar 97 persen pada tahun 2007. Tetapi jika dikaji lebih jauh akan nampak bahwa yang mendominasi angka melek huruf adalah penduduk dengan kategori usia muda. Hal ini tercermin dari angka yang tersaji pada Tabel 4.2 di bawah ini, di mana angka melek huruf penduduk usia 15-44 tahun sudah mencapai sekitar 98 persen. Sebaliknya untuk penduduk usia 45 tahun ke atas AMHnya hanya sekitar 89 persen.

Kajian AMH juga dapat dibedakan menurut golongan pengeluaran. Secara umum akan berlaku semakin tinggi golongan pengeluaran penduduk, maka semakin tinggi pula AMHnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.3 di mana pada penduduk dengan golongan pengeluaran tertinggi (tinggi dan sangat tinggi) AMHnya mencapai sekitar 99 persen, tetapi sebaliknya pada penduduk dengan golongan pengeluaran sangat rendah dan rendah AMHnya hanya mencapai sekitar 89 persen.

Tabel 4.2. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur dan Kemampuan Membaca dan Menulis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007

Kelompok Umur Pendidikan	Kemampuan membaca dan menulis				Total
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin dan Lainnya	Tidak Dapat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10 - 14	66,8	0,9	31,3	1	100,00
10 - 34	61,2	1,1	36,8	0,9	100,00
15 - 24	58,3	1,1	39,9	0,7	100,00
10 - 44	61,4	1,1	36,1	1,4	100,00
15 - 44	59,5	1,1	38,0	1,4	100,00
10+	59,7	1,4	35,9	3,0	100,00
15+	58,7	1,5	36,5	3,3	100,00
45+	56,4	2,2	33,3	8,1	100,00
60 +	51,7	3,7	30,1	14,5	100,00

Sumber : Susenas 2007

Tabel 4.3. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Keatas Menurut Quantil Pengeluaran Perkapita dan Kemampuan Membaca dan Menulis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007

Quantil Pengeluaran PerKapita	Dapat membaca dan menulis				Total
	Dapat Membaca Huruf Latin	Dapat Membaca Huruf Lainnya	Dapat Membaca Huruf Latin dan Lainnya	Tidak Dapat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Sangat Rendah	65,11	1,26	27,01	6,62	100,00
Pengeluaran Rendah	63,53	1,24	30,14	5,09	100,00
Pengeluaran Sedang	62,13	1,26	33,82	2,79	100,00
Pengeluaran Tinggi	60,34	1,78	36,93	0,95	100,00
Pengeluaran Sangat Tinggi	48,42	1,46	49,93	0,19	100,00
Total	59,69	1,41	35,87	3,03	100,00

Sumber : Susenas 2007

4.3.1.2 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menyatakan banyaknya penduduk usia sekolah (7-12, 13-15, dan 16-18) yang bersekolah tanpa melihat jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Dengan kata lain APS memfokuskan perhatian pada bersekolahnya anak usia sekolah tanpa memperhatikan apakah yang bersangkutan bersekolah sesuai dengan usianya. Tabel Lampiran 6 memperlihatkan pencapaian program Wajar Dikdas 9 tahun maupun program pendidikan sekolah menengah tahun 2007. Tampak di sini penduduk usia SD (7-12) yang sudah bersekolah pada tahun 2007 di Propinsi Sumatera Selatan mencapai 97.43 persen sedangkan yang berusia SLTP (13-15), 83.85 diantaranya telah bersekolah. Namun yang masih memprihatinkan, hanya sekitar 53.49 persen anak usia SM (16-18) yang dapat menikmati dunia pendidikan. Ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan di Propinsi Sumatera Selatan agar APS 16-18 (SM) dapat meningkat sehingga mencapai APS SLTP. Dengan demikian Rata-rata lama sekolah dapat pula ditingkatkan untuk menaikkan angka IPM.

Tabel 4.4. Disparitas APS Antar Kabupaten Kota Tahun 2007

Statistik	07-12 (SD)	13-15 (SLTP)	16-18 (SLTA)
Tertinggi	PLG (99,14)	PLG (93,82)	PLG (71,36)
Terendah	OKU (94,65)	OKI (68,97)	OKI (33,14)
Rentang	4.49	24.85	38.22
	APS<90	APS<70 OKI (68,97)	APS<40 OKI (33,14)

Sumber: Susenas 2007

Pencapaian cakupan dalam partisipasi sekolah antar kabupaten/kota tidak banyak berbeda pada jenjang SD, di mana APS tertinggi terdapat di Kota Palembang (99.14%) dan terendah di Kabupaten OKU (94.65). Pada jenjang yang lebih tinggi disparitas pencapaian partisipasi sekolah antar kabupaten/kota semakin tinggi. Pada tabel 5 di atas terlihat bahwa disparitas APS pada jenjang SLTP dan SLTA masing-masing mencapai 24.85 poin dan 38.22

poin. OKI merupakan kabupaten dengan APS SLTP < 70 persen yaitu (68.97%), sekaligus kabupaten dengan APS SLTA < 40 persen yaitu (33.14%).

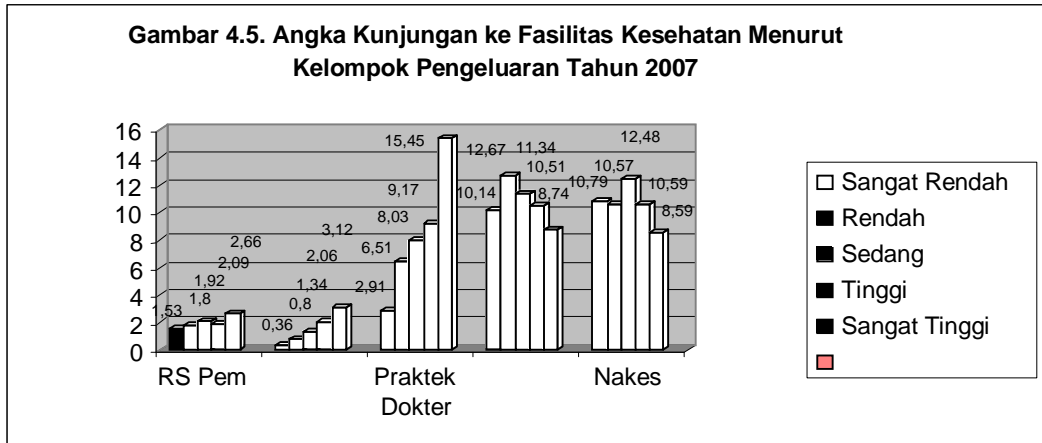
4.3.2. Akses Pada Layanan Kesehatan Dasar

Kesehatan merupakan aspek yang paling penting dan mendasar bagi semua orang. Namun untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik tidak mudah karena banyak faktor berpengaruh terhadap derajat kesehatan.

Selain AHH, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk adalah Angka Kematian Bayi (AKB). AKB merupakan indikator kesehatan yang erat kaitannya dengan harapan hidup. Tinggi rendahnya AHH dapat dilihat dari pola AKB. Menurut hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), pada kurun waktu 2003-2007 AKB di Sumatera Selatan diperkirakan masih cukup tinggi, yaitu 42 per 1000 kelahiran hidup sedangkan Angka Kematian Balita diperkirakan mencapai 52 per 1000 balita.

4.3.2.1 Pemanfaatan Fasilitas Dasar Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan sangat penting artinya dalam upaya pemeliharaan dan perawatan kesehatan masyarakat. Gambar 4.5 memperlihatkan pemanfaatan fasilitas kesehatan menurut golongan pengeluaran. Fasilitas kesehatan bermacam-macam yang dapat dimanfaatkan masyarakat: rumah sakit, puskesmas, poliklinik, dokter praktek, dan lain-lain. Terlihat di sini praktek dokter lebih banyak dikunjungi oleh penduduk dengan tingkat pendapatan tinggi (tinggi dan sangat tinggi) sedangkan penduduk dengan pengeluaran rendah (sangat rendah dan rendah) lebih banyak menggunakan tenaga kesehatan (nakes).



4.3.2.2 Layanan Kesehatan Reproduksi

Persalinan yang dibantu tenaga kesehatan selama tahun 2007 di Propinsi Sumatera Selatan telah mencapai 73,48 persen atau masih ada sekitar seperempat lagi kelahiran yang masih dibantu oleh dukun bayi, famili dan lainnya.

Selain persoalan ketersediaan fasilitas pelayanan persoalan kemampuan membayar untuk memperoleh pelayanan tersebut juga merupakan persoalan penting untuk ditelaah. Kalau dilihat menurut golongan pengeluaran, maka terlihat bahwa persalinan oleh tenaga kesehatan pada kelompok penduduk termiskin (sangat rendah) masih sangat rendah yaitu baru mencapai sekitar 60 persen. Namun sebaliknya pada penduduk terkaya (sangat tinggi) persalinannya sekitar 91 persen ditolong oleh tenaga kesehatan/medis.

Tabel 4.5. Persentase Penolong Kelahiran Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2007

Jenis Pengeluaran	% Medis	% Non Medis
Sangat Rendah	59,98	40,02
Rendah	66,27	33,73
Sedang	77,16	22,84
Tinggi	80,78	19,22
Sangat Tinggi	90,80	9,20
Total	73,48	25,52

Sumber: Susenas 2007, BPS

4.3.2.3 Status Gizi Balita

Dari Tabel 4.6 tampak adanya penurunan persentase balita berstatus gizi buruk dan kurang di Propinsi Sumatera Selatan dari 30.79 persen pada tahun 2003 menjadi 26.87 persen pada tahun 2005.

Kondisi kekurangan gizi balita antar kabupaten/kota juga memperlihatkan ketimpangan yang tinggi. Menurut Survey Garam Yodium (SGY) Tahun 2003, kriteria daerah rawan gizi kurang dan buruk terbagi menjadi 3 kategori. Yaitu daerah *low risk* jika persentase gizi kurang dan buruk kurang dari 20 persen. Kategori kedua disebut daerah *medium risk*, yaitu jika persentase gizi kurang dan buruk antara 20-40 persen. Kategori ketiga disebut *high risk* jika persentase gizi kurang dan buruk lebih dari 40 persen. Berdasarkan kategori tersebut pada tahun 2003 hanya Kabupaten Muara Enim yang persentasenya di bawah 20 persen (*low risk*). Sebaliknya Kabupaten OKI (46,78%) merupakan satu-satunya kabupaten yang berkategori *high risk*. Sementara kabupaten/kota lainnya termasuk *medium risk*. Pada tahun 2003, SGY untuk mendapatkan data status gizi balita hanya dilaksanakan pada 7 kabupaten induk, sehingga data kabupaten pecahannya masih tergabung dalam data kabupaten induknya. Namun pada tahun 2005, SGY sudah dilaksanakan di 14 kabupaten/kota.

Pada tahun 2005, yang tergolong daerah *low risk* adalah Muara Enim (15,38%) dan Kota Lubuk Linggau (17,30%). Sedangkan 12 kabupaten/kota lainnya termasuk kategori *medium risk*. Persentase balita bergizi buruk dan kurang tertinggi terdapat di OKU Timur (35,85%) disusul oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir (33,68%). Berbeda dengan keadaan tahun 2003, pada tahun 2005 sudah tidak ada satupun kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang tergolong *high risk*.

Tabel 4.6. Persentase Balita Gizi Buruk dan Kurang di Propinsi Sumatera Selatan 2003 dan 2005

Kabupaten/Kota	Gizi Buruk		Gizi Kurang		Total Gizi Buruk dan Kurang	
	2003	2005	2003	2005	2003	2005
(1)	(3)	(5)	(7)	(9)	(11)	(13)
Ogan Komering Ulu	5.45	7.06	15.00	14.51	20.45	21.57
Ogan Komering Ilir	17.34	5.79	29.44	27.89	46.78	33.68
Muara Enim	7.21	5.26	10.10	10.12	17.31	15.38
Lahat	11.45	11.76	22.03	17.16	33.48	28.92
Musi Rawas	11.03	11.67	22.06	17.50	33.09	29.17
Musi Banyuasin	10.04	14.03	16.85	16.91	26.89	30.94
Banyuasin	*	13.33	*	18.66	*	32.00
OKU Selatan	*	8.89	*	18.52	*	27.41
OKU Timur	*	11.79	*	24.06	*	35.85
Ogan Ilir	*	8.04	*	17.36	*	25.40
Palembang	8.93	7.71	24.70	16.57	33.63	24.29
Prabumulih	*	6.03	*	17.67	*	23.69
Pagaralam	*	4.19	*	19.17	*	23.35
Lubuklinggau	*	3.79	*	13.51	*	17.30
Sumatera Selatan	10.28	9.09	20.51	17.78	30.79	26.87

Keterangan : * = masih tergabung dalam kabupaten induk

BAB 5

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI SUMATERA SELATAN

5.1. Capaian IPM Kabupaten/Kota

Secara umum, IPM kabupaten/kota menggambarkan kinerja pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota. Kinerja pembangunan manusia bisa dinilai berhasil atau gagal berdasarkan capaian angka IPM. Selanjutnya, capaian angka IPM itu akan menentukan urutan (ranking) suatu daerah. Untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia, barangkali tidak mutlak dari urutan posisi (ranking), akan tetapi berdasarkan reduksi *shortfall*. Berdasarkan ukuran itu terlihat seberapa besar akselerasi capaian pembangunan manusia di suatu daerah.

Tidak jauh berbeda dengan perkembangan IPM Sumatera Selatan, IPM kabupaten/kota juga semuanya memperlihatkan peningkatan IPM selama periode 2005-2007. Meski demikian, dilihat dari tingkat kecepatan peningkatan IPM antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya berbeda. Ada kabupaten/kota menunjukkan peningkatan yang cukup tajam, ada pula kabupaten/kota dengan tingkat kecepatan IPM lambat, serta ada pula yang tidak menunjukkan peningkatan.

Pemekaran wilayah sebagai salah satu dampak dari otonomi daerah dan adanya perubahan IPM kabupaten/kota selama periode tahun 2005-2007 telah menyebabkan pergeseran urutan posisi kabupaten/kota. Tabel 5.1 menyajikan urutan empat tertinggi dan empat terendah kabupaten/kota berdasarkan IPM selama periode tahun 2005-2007. Pada tabel tersebut memperlihatkan adanya pergeseran posisi kabupaten/kota untuk empat urutan tertinggi. Pada tahun 2005-2007, IPM Kota Palembang dan Kota Prabumulih tetap berada pada posisi pertama dan kedua dibandingkan kabupaten/kota lainnya, sedangkan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang pada tahun 2005 berada pada posisi ketiga tertinggi, pada tahun 2006-2007 bergeser menjadi urutan keempat. Kota Pagaralam pada tahun 2006-2007 bergeser naik ke urutan tiga besar yang sebelumnya pada tahun 2005 masih berada di urutan keempat.

Pergeseran urutan IPM antara kabupaten/kota menunjukkan bahwa setiap kabupaten/kota saling berpacu dalam pembangunan manusia di daerahnya masing-masing.

Tabel 5.1 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dengan Urutan IPM Tertinggi dan Terendah, 2005-2007

<i>Tertinggi</i> Tahun 2005 Kabupaten/Kota	IPM	Tahun 2006 Kabupaten/Kota	IPM	Tahun 2007 Kabupaten/Kota	IPM
Kota Palembang	73,6	Kota Palembang	74.35	Kota Palembang	74.94
Kota Prabumulih	71,1	Kota Prabumulih	71.70	Kota Prabumulih	72.51
Kab. OKU	69,9	Kota Pagar Alam	71.06	Kota Pagar Alam	71.70
Kota Pagar Alam	69,9	Kab. OKU	70.86	Kab. OKU	71,40
<i>Terendah</i> Tahun 2005 Kabupaten/Kota	IPM	Tahun 2006 Kabupaten/Kota	IPM	Tahun 2007 Kabupaten/Kota	IPM
Kota Lubuk Linggau	66,3	Kab. OKU Timur	67,50	Kab. Ogan Ilir	68,17
Kab. Ogan Ilir	66,0	Kab. Ogan Ilir	67,24	Kab. OKU Timur	68,14
Kab. OKU Timur	65,4	Kab. Empat Lawang	66,59	Kab. Empat Lawang	67,17
Kab. Musi Rawas	65,0	Kab. Musi Rawas	65,65	Kab. Musi Rawas	66,31

Sementara itu, pada tahun 2005 empat kabupaten/kota terbawah dengan IPM terendah, yaitu Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten Musi Rawas. Satu hal yang menarik untuk dicermati bahwa tiga dari keempat kabupaten/kota tersebut merupakan daerah hasil pemekaran wilayah, hanya Kabupaten Musi Rawas yang merupakan kabupaten induk. Pada tahun 2006-2007, empat kabupaten/kota terbawah dengan IPM terendah tidak mengalami perubahan, hanya Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten Ogan Ilir saja yang mengalami perubahan posisi, sedangkan Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Musi Rawas tetap konsisten pada dua posisi terendah. Nilai dan peringkat IPM seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan disajikan selengkapnya pada lampiran.

5.2. Status Pembangunan Kabupaten/Kota

Pembangunan manusia di semua kabupaten/kota di Sumatera Selatan mengalami kemajuan. Namun demikian, kemajuan pembangunan manusia antar kabupaten/kota satu dengan kabupaten/kota lainnya sangat bervariasi. Kemajuan ini sangat tergantung dari komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

Tabel 5.2 Reduksi *Shortfall* Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2005-2007

Kabupaten/Kota	Reduksi Shortfall	
	2005-2006	2006-2007
01. Ogan Komering Ulu	3.19	1.86
02. Ogan Komering Ilir	0.74	0.40
03. Muara Enim (liot)	1.41	0.91
04. Lahat	2.56	2.92
05. Musi Rawas	1.86	1.92
06. Musi Banyuasin	0.89	2.13
07. Banyuasin	2.59	1.71
08. Ogan Komering Ulu Selatan	3.85	0.95
09. Ogan Komering Ulu Timur	6.07	1.97
10. Ogan Ilir	3.65	2.84
11. Empat Lawang	*	1.75
71. Kota Palembang	2.84	2.30
72. Kota Prabumulih	2.08	2.85
73. Kota Pagar Alam	3.85	2.20
74. Kota Lubuk Linggau	4.96	3,97

Keterangan : * masih tergabung dalam kabupaten induk

Kecepatan perubahan IPM selama 2005-2007 tercermin pada nilai reduksi *shortfall*. Namun demikian, apakah kecepatan perubahan tersebut dapat merubah status

pembangunannya? Berdasarkan skala internasional dari 15 kabupaten/kota di Sumatera Selatan belum ada satupun kabupaten/kota tergolong IPM tinggi. Meski demikian, IPM yang telah dicapai oleh sebagian besar kabupaten/kota pada tahun 2005 dan 2006 tergolong menengah ke atas, hanya Kabupaten Musi Rawas yang masih tergolong menengah ke bawah. Pada tahun 2007, semua kabupaten/kota telah tergolong menengah ke atas.

Kecepatan peningkatan IPM ini sangat tergantung dengan tinggi rendah angka IPM yang dicapai. Kabupaten/kota yang telah memiliki IPM tergolong tinggi cukup sulit untuk meningkatkan angka IPM. Sebaliknya, sangat mudah bagi kabupaten/kota yang masih memiliki IPM tergolong rendah untuk meningkatkan kecepatan peningkatan IPM.

5.3. Perkembangan Komponen IPM Kabupaten/Kota

5.3.1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Aspek kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya.

Tabel 5.3 menyajikan nilai dan peringkat angka harapan hidup Sumatera Selatan tahun 2005-2007. Pada tabel tersebut memperlihatkan tidak adanya pergeseran posisi kabupaten/kota untuk empat urutan tertinggi selama periode waktu tersebut, yaitu Kota Prabumulih, Kota Palembang, Kota Pagaralam dan Kabupaten OKU selatan. Sedangkan posisi kabupaten/kota untuk empat urutan terendah selama periode waktu tersebut mengalami sedikit pergeseran. Pada tahun 2005, posisi kabupaten/kota untuk empat urutan angka harapan hidup terendah adalah Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas, sedangkan pada tahun 2006-2007, posisi kabupaten/kota untuk empat urutan angka harapan hidup terendah adalah Kabupaten Ogan Ilir, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Musi Rawas

Tabel 5.3 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2005 – 2007

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)			Peringkat Angka Harapan Hidup se Sumsel		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
01. Ogan Komering Ulu	68,8	69.00	69.10	5	5	5
02. Ogan Komering Ilir	66,9	67.10	67.33	10	8	8
03. Muara Enim (liot)	66,6	66.90	67.09	11	10	10
04. Lahat	66,8	66.90	67.24	8	9	9
05. Musi Rawas	63,2	64.00	64.14	14	15	15
06. Musi Banyuasin	68,7	68.80	69.07	6	6	6
07. Banyuasin	66,6	66.70	66.88	9	11	11
08. OKU Selatan	68,9	69.10	69.16	4	4	4
09. OKU Timur	67,8	68.10	68.16	7	7	7
10. Ogan Ilir	64,8	65.10	65.40	12	12	12
11. Empat Lawang	*	65.00	65.14	*	14	14
71. Kota Palembang	69,9	70.20	70.43	2	2	2
72. Kota Prabumulih	70,0	70.30	70.71	1	1	1
73. Kota Pagar Alam	69,2	69.30	69.52	3	3	3
74. Kota Lubuk Linggau	64,7	65.10	65.24	13	13	13

Keterangan : * = masih tergabung dalam kabupaten induk=

Tabel 5.4 Angka Kematian Bayi (IMR) dan Angka Kematian Ibu (MMR) Kabupaten/Kota Tahun 2004

Kabupaten/Kota	IMR		MMR
	Lk	Pr	
(2)	(3)	(4)	(6)
Ogan Komering Ulu	52,95	39,72	516,65
Ogan Komering Ilir	52,18	39,10	490,11
Muara Enim	52,75	39,58	513,98
Lahat	49,15	49,15	477,38
Musi Rawas	48,08	36,02	476,62
Musi Banyuasin	51,46	38,60	532,01
Kota Palembang	26,30	19,73	316,63
Sumatera Selatan	45,76	34,33	466,9

Sumber : BPS

Cat: Data hanya tersedia untuk 7 kabupaten/kota binaan UNFPA

Angka harapan hidup ini sangat dipengaruhi oleh angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Tabel 5.4 memperlihatkan bahwa Kota Palembang memiliki angka kematian bayi

dan angka kematian ibu terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan. Angka kematian bayi di Kota Palembang pada tahun 2004 mencapai 36,17 yang artinya ada 36 bayi yang meninggal pada 1000 kelahiran hidup. Data pada tabel 5.4 tersebut mendukung uraian sebelumnya yang menyatakan bahwa angka harapan hidup Kota Palembang menempati posisi kedua tertinggi setelah Kota Prabumulih. Angka kematian ini sangatlah terpengaruh dari kondisi kesehatan masyarakat setempat, asupan gizi dan tentu saja sanitasi lingkungan penduduknya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya angka kematian bayi adalah penolong kelahiran (lihat lampiran 7). Persentase balita dengan penolong kelahiran terakhir oleh tenaga medis di Kota Palembang memang berada di atas rata-rata Sumatera Selatan (95,49%). Adapun persentase balita dengan penolong kelahiran terakhir oleh tenaga medis di Kabupaten OKU Selatan adalah yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya, hanya 43,89 persen.

Angka kematian bayi diantaranya juga dipengaruhi secara tidak langsung oleh kondisi sanitasi di sekitar tempat tinggalnya. Untuk melihat kondisi sanitasi kabupaten/kota di Sumatera Selatan digunakan variabel-variabel sebagai berikut: sumber air minum dan jarak pembuangan tinja dengan sumber air minum.

Tabel dari lampiran 9 memperlihatkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Selatan masih menggunakan sumur terlindung sebagai sumber air minum. Persentase Penduduk di Kabupaten Musi Rawas yang menggunakan sumber air minum berpotensi tidak higienis berada pada urutan tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya (96,89%), sedangkan persentase terendah berada di Kota Palembang (22,15%).

Data pada lampiran 10 memperlihatkan bahwa persentase rumah tangga di Sumatera Selatan yang jarak sumber air minum ke penampungan tinjanya kurang dari 10 meter terus mengalami penurunan dari 30,10 persen pada Tahun 2005 menjadi 24,58 persen pada Tahun 2007, hal ini mengindikasikan bahwa secara tidak langsung kondisi kesehatan di Sumatera Selatan terus membaik selama 3 tahun terakhir. Jika diadakan pengamatan per kabupaten/kota, Kota Lubuk Linggau (47,62%) memiliki persentase terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya, hal ini menunjukkan bahwa hampir 50 persen rumah tangga di Kota Lubuk Linggau memiliki jarak sumber air minum ke penampungan tinja kurang dari 10 meter. Jika dibiarkan

secara terus menerus, kondisi ini akan berdampak negatif terhadap kondisi kesehatan penduduk di Kota Lubuk Linggau.

Indikator lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Menurut tabel di lampiran 8, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2007 merupakan yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya yaitu mencapai 43,23 persen yang jika dibandingkan dengan angka propinsi, angka tersebut berada di atas angka Sumatera Selatan (31,33%). Dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tersebut ada yang mengobati sendiri penyakitnya ada pula yang berobat jalan ke layanan fasilitas kesehatan.

5.3.2. Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah

Untuk mengetahui kondisi kualitas pendidikan kabupaten/kota di Sumatera Selatan, dibahas dua indikator utama pendidikan yang menunjang IPM yaitu inversnya melek huruf (buta huruf) dan angka partisipasi sekolah (APS). Selain itu juga akan dilihat tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk di masing-masing kabupaten/kota.

Tabel di lampiran 3 memperlihatkan bahwa pada tahun 2007, Kabupaten OKU Timur (94,63%) dan Kabupaten OKI (94,65%) memiliki persentase melek huruf terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan. Sedangkan persentase melek huruf tertinggi dicapai oleh Kabupaten Muara Enim (98,80%) dan Kota Palembang (98,63%). Untuk bisa menggambarkan karakteristik penduduk yang buta huruf secara lebih rinci, sebaiknya memang indikator ini dilihat menurut kelompok umur sehingga akan jelas kelompok usia mana yang dominan angka buta hurufnya. Namun sayangnya data susenas yang sampelnya terbatas tidak memungkinkan dilakukannya pemecahan kelompok umur untuk angka melek huruf tingkat kabupaten/kota.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat keberhasilan program pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Tabel pada lampiran 5 memperlihatkan bahwa APS kelompok umur SD (7-12) tertinggi dicapai oleh Kota Palembang (99,14%), sedangkan yang terendah adalah Kabupaten OKU yang hanya sebesar 94,65 persen. Untuk kelompok umur SLTP (13-15), APS Kota Pagaralam merupakan yang tertinggi, yaitu mencapai 96,13 persen, sedangkan

APS Kabupaten OKI merupakan yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya, yaitu hanya mencapai 68,97 persen. Untuk kelompok umur selanjutnya (16-18), APS Kota Palembang kembali menjadi yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, yaitu mencapai 71,36 persen, sedangkan APS Kabupaten OKI kembali menjadi yang terendah, yaitu hanya 33,14 persen. Secara umum terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah APS yang dicapai.

Selain kedua indikator yang telah dijelaskan di atas, kondisi kualitas pendidikan kabupaten/kota di Sumatera Selatan bisa dilihat pula dari persentase penduduk berdasarkan ijazah tertinggi yang dimiliki. Tabel pada lampiran 6 memperlihatkan bahwa penduduk yang tidak memiliki ijazah di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki persentase tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, yaitu mencapai 33,84 persen dan Kota Palembang memiliki persentase terendah, hanya 16,37 persen. Sebaliknya, penduduk yang berpendidikan SMU ke atas tercatat yang tertinggi di Kota Palembang (9,69%), Kota Lubuk Linggau (9,00%) dan Kota Prabumulih (8,13%). Kabupaten/kota yang memiliki penduduk tamatan SMU ke atas yang kurang dari 2 persen tercatat di Kabupaten OKU Selatan (1,07%), Kabupaten OKU Timur (1,34%), Kabupaten OKI (1,53%), Kabupaten Musi Rawas (1,68%), Kabupaten Empat Lawang (1,71 persen) dan Kabupaten Muara Enim (1,95%).

5.3.3. Daya Beli

Daya beli menunjukkan tingkat kemampuan ekonomi penduduk di suatu tempat yang sudah distandarisasi. Daya beli suatu kabupaten/kota bisa dilihat dari besarnya pengeluaran per kapita riil disesuaikan. Data pada lampiran 4 memperlihatkan bahwa pada Tahun 2005, Kota Palembang memiliki daya beli tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan, sedangkan OKU Timur merupakan yang terendah. Kondisi ini belum mengalami perubahan pada tahun 2006, dimana Kota Palembang masih memiliki daya beli tertinggi dan Kabupaten OKU Timur merupakan yang terendah.

Di tahun 2007, terjadi pergeseran posisi dimana Kabupaten Musi Rawas merupakan kabupaten yang memiliki daya beli terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan, sedangkan posisi kabupaten yang memiliki daya beli tertinggi tidak mengalami perubahan selama tiga tahun terakhir ini.

BAB 6

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEMISKINAN

Kesenjangan nilai IPM antar kabupaten/ kota setidaknya mencerminkan adanya perbedaan pada pemanfaatan hasil pembangunan ekonomi dan sosial selama ini yang dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Sumatera Selatan. Pembangunan manusia merupakan cara yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Oleh karena itu, tinggi rendahnya nilai IPM di suatu daerah diharapkan dapat mengukur tingkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh di wilayah tersebut. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara. Diperlukan kemauan politik yang cukup kuat dari pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten /kota.

Mungkin tidak ada satupun negara di dunia ini yang akan bisa terlepas sepenuhnya dari persoalan kemiskinan. Demikian pula halnya yang terjadi di Indonesia. Sejak memproklamkan kemerdekaannya hingga saat ini persoalan kemiskinan tetap menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Padahal sepanjang berdirinya republik ini berbagai program pembangunan yang ditujukan bagi pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan. Satu hal yang paling mungkin dilakukan tentunya adalah bagaimana menciptakan agar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin tidak terlalu jauh. Namun untuk mencapainya dibutuhkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif.

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antarwaktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Pengukuran kemiskinan yang terpercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin.

Pengukuran kemiskinan yang dilakukan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs aproach*). Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS

tetapi juga oleh negara-negara lain di Asia. Dengan demikian kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut pendekatan ini penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Secara teknis GK dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan non Makanan (GKNM)

$$GK = GKM + GKNM$$

GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari yang diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, dll). Ke 52 komoditi tersebut merupakan komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin.

GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

6.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan 2005-2007

Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan pada kurun waktu 2005-2007 polanya berfluktuasi. Pada periode 2005-2006 secara absolut jumlah penduduk miskin meningkat dari 1429.0 ribu jiwa pada tahun 2005 menjadi 1446.9 ribu jiwa pada tahun 2006. Namun secara persentase banyaknya penduduk miskin mengalami penurunan, yaitu dari 21.01 persen menjadi 20.99 persen. Penurunan ini terus berlanjut pada tahun 2007, yaitu menjadi 19.15 persen atau 1331.8 ribu jiwa.

6.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2007-Maret 2008

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan pada bulan Maret 2008 sebesar 1249.6 ribu jiwa (17.73%). Angka ini merujuk pada kondisi sebelum kenaikan harga BBM pada bulan Juni 2008. Dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Maret 2007 yang berjumlah 1331.8

ribu (19.15 %) berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 82.2 ribu orang. Secara persentase penduduk miskin Maret 2008 juga lebih rendah dari Maret 2007 (17.73% berbanding 19.15%).

Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam daripada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2007-Maret 2008 penduduk miskin di perdesaan turun 51 ribu orang, sementara di perkotaan hanya berkurang sebesar 31.2 ribu orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2008 sebagian besar (58.81%) penduduk miskin berada di daerah perdesaan.

Tabel 6.1
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, Maret 2007-Maret 2008

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (000)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
<u>Perkotaan</u>					
Maret 2007	150.970	54.175	205.145	545,9	20,30
Maret 2008	168.597	60.954	229.552	514,7	18,87
<u>Perdesaan</u>					
Maret 2007	131.301	29.904	161.205	785,9	18,43
Maret 2008	142.200	33.356	175.556	734,9	17,01
<u>Kota+Desa</u>					
Maret 2007	138.913	39.296	178.209	1 331,8	19,15
Maret 2008	152.415	44.036	196.452	1 249,6	17,73

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2007 dan Maret 2008

6.3 Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2007-Maret 2008

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Selama Maret 2007-Maret 2008, Garis Kemiskinan naik sebesar 10,24 persen, yaitu dari Rp.178.209,- per kapita per bulan pada Maret 2007 menjadi Rp.196.452,- per kapita per bulan pada Maret 2008. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Maret 2007, sumbangan GKM terhadap GK hanyasebesar 77,95 persen, tetapi pada bulan Maret 2008, peranannya menurun menjadi 77,58 persen

6.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode Maret 2007-Maret 2008, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 3,84 pada keadaan Maret 2007 menjadi 3,15 pada keadaan Maret 2008. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 1,14 menjadi 0,85 pada periode yang sama (Tabel 6.2). Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil

Tabel 6.2
 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di
 Indonesia Menurut Daerah, Maret 2007- Maret 2008

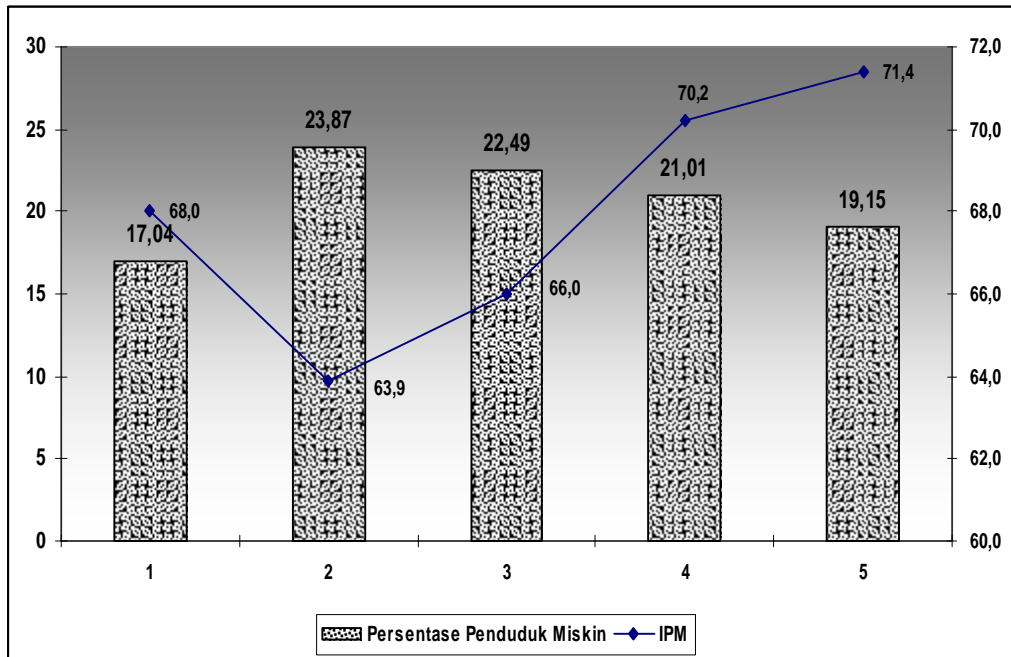
Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
<u>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)</u>			
Maret 2007	4,92	3,16	3,84
Maret 2008	3,82	2,73	3,15
<u>Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)</u>			
Maret 2007	1,63	0,83	1,14
Maret 2008	1,20	0,64	0,85

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2007 dan Maret 2008

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dari pada perdesaan. Pada bulan Maret 2008, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) untuk perdesaan hanya 2,73 sementara di daerah perkotaan mencapai 3,82. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) untuk perdesaan hanya 0,64 sementara di daerah perkotaan mencapai 1,20. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perkotaan lebih parah dari pada daerah perdesaan.

Gambar berikut mengilustrasikan hubungan antara IPM dan insiden kemiskinan di Sumatera Selatan. Tampak di sini bahwa hubungan antara kedua indikator ini bersifat negatif dan dengan r sebesar $-0,643$. Hubungan ini berarti bahwa semakin tinggi nilai IPM semakin rendah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Gambar 6.1. Hubungan Antara IPM dan Persentase Penduduk Miskin, Sumatera Selatan



BAB 7

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

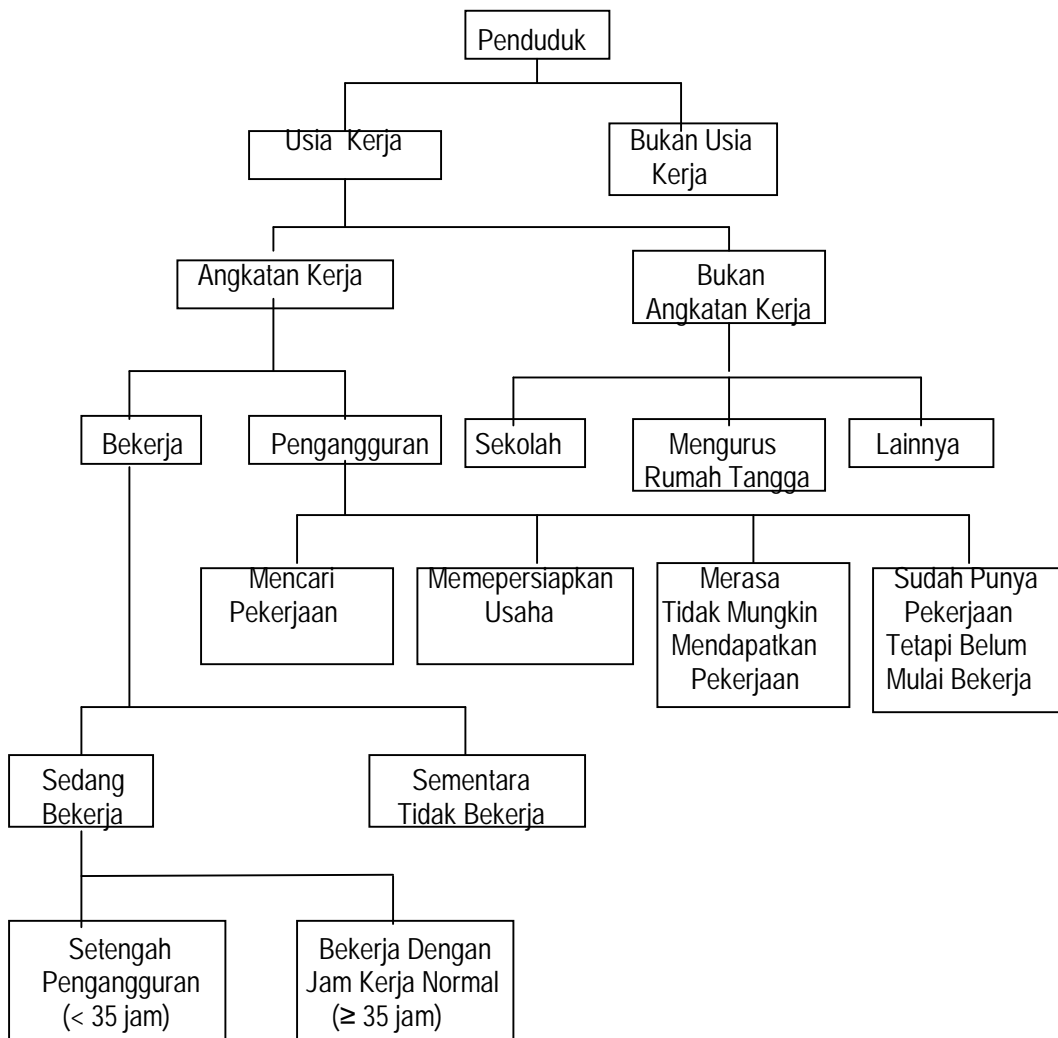
7.1. Konsep Ketenagakerjaan

Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan dalam suatu kurun waktu tertentu. Dengan demikian, ketersediaan data ketenagakerjaan yang berkualitas dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPS telah melaksanakan pengumpulan dan penyajian data kependudukan dan ketenagakerjaan melalui berbagai kegiatan sensus dan survei antara lain Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Sakernas merupakan survei yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan dengan pendekatan rumah tangga.

Sakernas dilaksanakan sejak tahun 1976, namun baru mulai tahun 1986 dilakukan secara berkala. Sampai saat ini, Sakernas telah mengalami berbagai perubahan terutama dalam periode pencacahan, metodologi maupun cakupan sampel wilayah rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan tahun 1993, Sakernas dilaksanakan secara triwulanan, tahun 1994 sampai dengan tahun 2001 dilakukan secara tahunan, yaitu pada setiap Bulan Agustus kecuali pada Tahun 1995, Sakernas tidak dilakukan karena data ketenagakerjaan dapat diperoleh dari Supas 1995. Tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, selain secara tahunan Sakernas juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 hingga Tahun 2007 Sakernas dilaksanakan secara semesteran yaitu semester I pada Bulan Februari dan semester II pada Bulan Agustus, akan tetapi pelaksanaan Sakernas semester II pada Tahun 2005 terpaksa tertunda pelaksanaannya menjadi Bulan November 2005 karena pada Bulan Agustus-Oktober 2005 BPS melaksanakan kegiatan survei *urgent* berskala nasional lainnya.

Dalam mengumpulkan dan menyajikan data ketenagakerjaan, BPS selalu menggunakan konsep dan definisi yang direkomendasikan oleh *International Labor Organization (ILO)*. Hal ini dimaksudkan agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi spesifik ketenagakerjaan Indonesia. Menurut konsep *Labor Force Framework*, penduduk dibagi dalam beberapa kelompok. Kelompok-kelompok tersebut dapat digambarkan dalam diagram ketenagakerjaan sebagai berikut :



Gambar 7.1 Diagram Ketenagakerjaan

Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan pada pelaksanaan Sakernas 1986 sampai dengan 2000, sedangkan sejak tahun 2001 definisi pengangguran mengalami penyesuaian seperti yang ditunjukkan pada diagram ketenagakerjaan di atas. Penganggur dengan konsep/definisi tersebut dikenal sebagai *penganggur terbuka (open unemployment)*.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hor criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan bekerja. Berdasarkan hal-hal dimaksud, maka di dalam pelaksanaan Sakernas digunakan konsep/definisi "*bekerja paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu*" untuk mengkategorikan seseorang bekerja.

7.2. Perkembangan Variabel-Variabel Ketenagakerjaan

7.2.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pertambahan jumlah penduduk berakibat pada meningkatnya jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja), dengan demikian jumlah penduduk yang memasuki angkatan kerja juga akan meningkat. Kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Selatan secara umum tidak menunjukkan gejala yang berbeda, dimana peningkatan jumlah tenaga kerja sebanyak 99.478 orang selama setahun terakhir, diikuti pula dengan peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 39.543 orang. Akan tetapi, laju pertumbuhan tenaga kerja sebesar 2,08 persen per tahun, masih lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan angkatan kerja yang hanya sebesar 1,19 persen per tahun.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja atau tenaga kerja. Ukuran ini secara kasar dapat menerangkan tentang kecenderungan tenaga kerja untuk aktif bekerja atau mencari kerja yang sifatnya mendatangkan kesempatan berpenghasilan baik berupa uang atau barang. Makin tinggi angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi.

Jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja, dan berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis merupakan besaran-besaran yang mempengaruhi TPAK.

Tabel 7.1 Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 dan 2007

Jenis Kelamin	2006	2007	Laju Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tenaga Kerja			
- Laki-laki	2.461.652	2.433.881	-1.13
- Perempuan	2.324.018	2.451.267	5.48
- Total	4.785.670	4.885.148	2.08
Angkatan Kerja			
- Laki-laki	2.150.095	2.048.073	-4.74
- Perempuan	1.182.694	1.324.259	11.97
- Total	3.332.789	3.372.332	1.19

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

TPAK penduduk Sumatera Selatan tahun 2007 sebesar 69,03 sedikit lebih rendah dari angka pada tahun 2006 yang mencapai 69,64. Jika dicermati, penurunan TPAK selama setahun terakhir terjadi pada penduduk laki-laki, baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan. Sedangkan TPAK penduduk perempuan justru mengalami peningkatan, baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan. Peningkatan TPAK perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain semakin meningkatnya pendidikan perempuan, terbukanya kesempatan kerja yang lebih besar bagi perempuan, meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat, seperti pandangan terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah dan sebagainya.

Pada Tabel 7.2 dapat dilihat bahwa TPAK perempuan cukup rendah khususnya di daerah perkotaan. Di daerah perkotaan TPAK perempuan sebesar 43,81, sedikit lebih baik

dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 39,88, sedangkan di daerah pedesaan TPAK perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan pedesaan, yaitu sebesar 60,38, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 57,01. Tingginya TPAK perempuan di pedesaan lebih disebabkan karena sifat pekerjaan di sektor pertanian di pedesaan yang biasanya melibatkan perempuan sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

Tabel 7.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006-2007

Daerah/ Jenis Kelamin	2006	2007
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
- Laki-laki	79,73	76.39
- Perempuan	39,88	43.81
- Total	59,93	58.46
Pedesaan		
- Laki-laki	91,29	87.73
- Perempuan	57,01	60.38
- Total	74,85	74.72
Perkotaan+Pedesaan		
- Laki-laki	87,34	84.15
- Perempuan	50,89	54.02
- Total	69,64	69.03

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

TPAK di daerah perkotaan baik laki-laki maupun perempuan lebih rendah dibandingkan daerah pedesaan. Hal ini tidak terlepas dari adanya perbedaan sifat pekerjaan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Struktur ekonomi pedesaan yang lebih fleksibel karena lebih banyak usaha yang bersifat informal. Di daerah pedesaan sebagian besar lapangan pekerjaan adalah sektor-sektor tradisional yang relatif kurang membutuhkan kualifikasi tertentu

bagi tenaga kerja yang akan memasukinya. Selain itu, sifat dan aktifitas pekerjaan masih dalam lingkungan rumahtangga atau keluarga, bahkan memungkinkan sekali kaum perempuan pedesaan bekerja sambil mengasuh anak. Berbeda dengan di daerah perkotaan yang sebagian besar jenis pekerjaan yang ada bersifat formal dan membutuhkan kualifikasi tertentu bagi tenaga kerja yang akan memasukinya.

Tabel 7.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Ogan Komering Ulu	79.52	44.94	63.18
2. Ogan Komering Ilir	90.59	61.46	76.63
3. Muara Enim	87.67	58.20	73.05
4. Lahat	83.20	61.97	72.91
5. Musi Rawas	89.00	62.82	76.58
6. Musi Banyuasin	87.82	55.11	71.89
7. Banyuasin	86.81	62.97	75.01
8. OKU Selatan	89.01	65.20	77.81
9. OKU Timur	84.74	45.99	66.48
10. Ogan Ilir	87.33	67.73	77.74
11. Empat Lawang	83.08	63.34	73.27
71. Palembang	73.46	40.00	54.86
72. Prabumulih	82.32	52.70	66.13
73. Pagaralam	84.11	62.99	73.55
74. Lubuklinggau	82.36	39.78	59.52
Sumatera Selatan	84.15	54.02	69.03

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

Seperti ditunjukkan oleh data pada Tabel 7.3 kabupaten-kota yang lebih dominan dengan karakteristik pedesaan mempunyai TPAK yang lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Kabupaten OKU Selatan sebagai contoh, mempunyai TPAK tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, yaitu sebesar 77,81. Sedangkan Kota Palembang mempunyai angka TPAK terendah, yaitu sebesar 54,86.

Walaupun Kabupaten OKU Selatan memiliki TPAK tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Sumatera selatan, akan tetapi jika dilihat dari aspek gender, TPAK penduduk laki-laki tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu sebesar 90,59 dan yang terendah dimiliki oleh Kota Palembang yang hanya sebesar 73,46. Sedangkan TPAK penduduk perempuan tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Ogan Ilir yaitu sebesar 67,73 dan yang terendah dimiliki oleh Kota Lubuk Linggau sebesar 39,78.

Data yang ditampilkan pada Tabel 7.3 memperkuat uraian sebelumnya bahwa baik secara absolut maupun ditinjau dari aspek gender, kabupaten-kabupaten yang lebih dominan berkarakteristik pedesaan mempunyai TPAK yang cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.

7.2.2. Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera Selatan pada tahun 2007 sebesar 9,34 persen. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2006, tingkat pengangguran pada tahun 2007 hanya mengalami peningkatan 0,01 persen. Dengan angka sebesar itu, secara absolut jumlah penganggur masih cukup besar yaitu mencapai 314.814 orang, dimana 73,7 persen diantaranya belum pernah bekerja sebelumnya. Tingginya jumlah penganggur tersebut menunjukkan masih banyaknya pencari kerja yang tidak tertampung oleh lapangan kerja yang ada, sehingga menyebabkan mereka terpaksa menganggur. Untuk itu, diperlukan penciptaan lapangan kerja yang cukup banyak untuk dapat menampung tenaga kerja yang menganggur tersebut. Selain itu perkembangan keadaan perekonomian juga berpengaruh terhadap meningkatnya tingkat pengangguran. Dampak dari krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 juga berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran.

Tabel 7.4 Jumlah Penduduk yang Menganggur Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Sumatera Selatan Tahun 2006 dan 2007

Daerah	2006			2007		
	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	74.217	72.766	146.982	108.171	76.966	185.137
Pedesaan	74.469	89.400	163.869	73.284	56.393	129.677
Total	148.685	162.166	310.851	181.455	133.359	314.814

Sumber: BPS, diolah dari Sakernas 2006 dan 2007

Tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di kota selain karena pengaruh pertumbuhan alamiah penduduk, kemungkinan juga karena dipengaruhi oleh arus masuk angkatan kerja dari daerah pedesaan juga banyaknya pencari kerja pertama kali sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendidikan penduduk di perkotaan. Sementara itu kesempatan kerja sektor-sektor produktif di perkotaan yang tersedia tidak mampu menampung para pencari kerja, maka berakibat pada tingginya tingkat pengangguran. Berbeda dengan daerah pedesaan yang pada umumnya tingkat pendidikan penduduknya relatif masih rendah sehingga angkatan kerja yang ada tidak mempunyai banyak tuntutan terhadap jenis pekerjaan yang diinginkan dan mau menerima pekerjaan-pekerjaan di sektor tradisional.

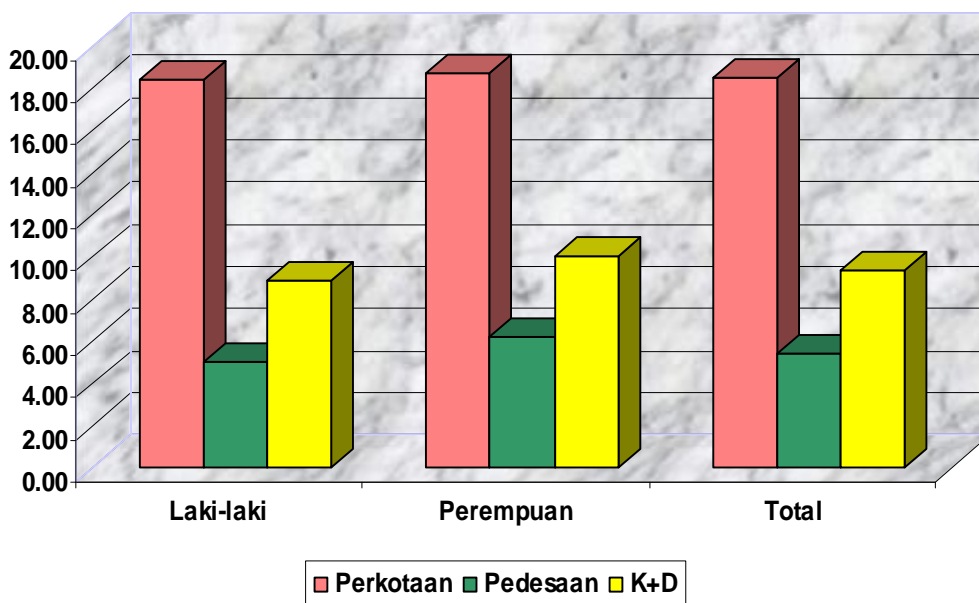
Tabel 7.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Sumatera Selatan Tahun 2006 dan 2007

Daerah	2006			2007		
	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	11,07	21,99	14,68	18,43	18,68	18,53
Pedesaan	5,03	10,50	7,03	5,02	6,18	5,46
Total	6,92	13,71	9,33	8,86	10,07	9,34

Sumber: BPS, diolah dari Sakernas 2006 dan 2007

Tingkat pengangguran perempuan terutama di perkotaan lebih tinggi dibandingkan pengangguran laki-laki. Sebagaimana halnya dengan angka TPAK perempuan perkotaan pada bahasan sebelumnya, bahwa salah satu faktor pendorong kaum perempuan untuk memasuki angkatan kerja adalah faktor pendidikan. Pendidikan yang lebih baik akan meningkatkan aspirasi dan harapan akan penghasilan dan kehidupan yang lebih baik, sehingga mendorong mereka untuk bersaing dengan kaum laki-laki untuk memperebutkan kesempatan kerja. Sementara terbatasnya lapangan kerja sektor moderen diperkotaan menyebabkan mereka yang tidak tertampung oleh kesempatan kerja yang ada terpaksa harus menganggur. Selain itu, pada momen-momen tertentu penduduk laki-laki lebih besar peluangnya untuk memasuki pasar kerja dibandingkan perempuan, sehingga tingkat pengangguran perempuan menjadi tinggi.

Gambar 7.2 Tingkat Pengangguran Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kota-Desa Tahun 2007



Tingkat pengangguran terbuka bervariasi antar kabupaten/kota. Sebagaimana sudah dibahas dalam uraian sebelumnya. Tabel 7.6 memperlihatkan bahwa daerah-daerah yang dominan dengan karakteristik pedesaan memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dibanding daerah-daerah dengan klasifikasi urban. Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten OKU

Selatan dan Kabupaten Lahat yang mewakili kabupaten yang masih didominasi daerah pedesaan mempunyai tingkat pengangguran terbuka yang rendah. Sedangkan Kota Palembang mempunyai tingkat pengangguran tertinggi yaitu 19,43 persen.

Tabel 7.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Ogan Komering Ulu	8.54	9.83	8.97
2. Ogan Komering Ilir	8.17	9.19	8.57
3. Muara Enim	8.39	7.12	7.89
4. Lahat	4.50	5.31	4.83
5. Musi Rawas	2.71	7.41	4.54
6. Musi Banyuasin	4.94	5.36	5.09
7. Banyuasin	4.65	7.89	5.99
8. OKU Selatan	3.90	5.88	4.68
9. OKU Timur	8.10	10.37	8.84
10. Ogan Ilir	6.41	6.35	6.39
11. Empat Lawang	5.40	9.13	7.01
71. Palembang	20.52	17.83	19.43
72. Prabumulih	15.05	17.93	16.31
73. Pagaralam	8.82	12.07	10.21
74. Lubuklinggau	13.50	26.59	18.19
Sumatera Selatan	8.86	10.07	9.34

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

Permasalahan ketenagakerjaan lainnya yang dihadapi Provinsi Sumatera Selatan adalah tingginya tingkat pengangguran terdidik terutama di daerah perkotaan. Tabel. 7.7 memberikan gambaran mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengangguran. Ternyata bahwa di Sumatera Selatan pendidikan yang tinggi belum merupakan jaminan untuk segera mendapatkan pekerjaan. Terbukti tingkat pengangguran pada jenjang pendidikan SLTA dan PT lebih tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.

Tingkat pengangguran terdidik didefinisikan sebagai rasio jumlah pencari kerja berpendidikan SLTA keatas (sebagai kelompok terdidik) terhadap angkatan kerja pada kelompok tersebut.

Tabel 7.7 Tingkat Pengangguran Terdidik Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
< SD	3.48	2.79	3.17
SD	4.30	4.46	4.37
SLTP	8.69	15.41	10.87
SLTA	18.45	26.52	21.01
PT	19.54	14.54	16.87
Total	8.86	10.07	9.34

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

Pada tahun 2007 tingkat pengangguran terdidik di Sumatera Selatan sebesar 37,88, mengalami peningkatan sebanyak 14,65 dibandingkan kondisi setahun sebelumnya sebesar 23,23. Data tersebut mengindikasikan bahwa dari setiap 100 orang angkatan kerja berpendidikan SLTA keatas di Sumatera Selatan pada Tahun 2007, sebanyak 37 sampai 38 orang diantaranya sedang menganggur. Dapat diduga bahwa mereka yang termasuk dalam kelompok pengangguran terdidik adalah para pencari kerja usia muda atau pencari kerja pertama kali yang baru tamat dari pendidikan sekolah.

Seperti telah disinggung sebelumnya banyak faktor yang mungkin mempengaruhi demikian tingginya tingkat pengangguran terdidik. Karena pendidikan yang relatif tinggi, mereka umumnya merasa enggan untuk bekerja di kegiatan ekonomi informal. Pilihan utama biasanya untuk bekerja di sektor-sektor formal atau sektor-sektor ekonomi produktif. Padahal lapangan

kerja di sektor-sektor tersebut ketersediaanya sangat terbatas, sehingga mereka terpaksa menganggur.

Dimensi lain dari permasalahan ketenagakerjaan adalah pemanfaatan tenaga kerja dalam hal ini biasanya diistilahkan dengan setengah pengangguran. Mereka yang dikategorikan sebagai setengah pengangguran yaitu mereka yang sudah bekerja tetapi jam kerjanya kurang dari 35 jam selama seminggu. Indikator ini menggambarkan tingkat pemanfaatan tenaga kerja yang rendah sekaligus juga menggambarkan rendahnya produktifitas pekerja. Karena meskipun mereka bekerja tetapi belum menggunakan seluruh kapasitas sumber daya yang ada seperti tingkat pendidikan, skill dan keterampilan yang dimiliki atau tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang diharapkan sehingga mereka masih berusaha mendapatkan pekerjaan lain.

Di Provinsi Sumatera Selatan, seperti yang ditunjukkan oleh data pada Tabel 7.8 pada tahun 2007 tingkat setengah pengangguran angkanya cukup tinggi yaitu 37,63. Artinya dari setiap 100 angkatan kerja yang sudah bekerja sebanyak 37 sampai 38 orang mempunyai jam kerja yang relatif kecil (kurang dari 35 jam per minggu).

Dari fakta di atas, tampak jelas bahwa problem pengangguran di Sumatera Selatan cukup berat. Meskipun tingkat pengangguran terbuka daerah ini tergolong rendah yaitu sebesar 9,34 persen, namun bila ditambah dengan tingkat setengah pengangguran, angkanya cukup besar, mencapai hampir separuh dari angkatan kerja. Karena kelompok setengah pengangguran ini sebenarnya juga masih termasuk dalam kelompok pencari kerja yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Dengan tidak adanya tunjangan bagi pengangguran di negara kita, maka para pencari kerja tidak mungkin terus bertahan sebagai penganggur. Mereka terpaksa menerima atau melakukan pekerjaan apa saja (meskipun tidak sesuai dengan pendidikan atau skill yang dimiliki) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sambil menunggu kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Bila dilihat menurut kabupaten/kota, hampir diseluruh kabupaten/kota di seluruh Sumatera Selatan mempunyai tingkat setengah pengangguran yang tinggi. Bahkan bila diamati lebih lanjut, kabupaten-kabupaten dengan dominasi daerah pedesaan OKU, OKI dan Musi Rawas memiliki tingkat setengah pengangguran justru tinggi. Padahal di daerah-daerah tersebut tingkat pengangguran terbukanya relatif rendah bila dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Dari sini dapat di duga bahwa sebagian besar dari mereka yang

termasuk dalam kelompok setengah pengangguran adalah para pekerja keluarga di sektor pertanian di pedesaan.

Tabel 7.8 Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Ogan Komering Ulu	41.89	54.52	46.13
2. Ogan Komering Ilir	43.17	51.98	46.55
3. Muara Enim	38.23	48.44	42.26
4. Lahat	36.79	49.54	42.14
5. Musi Rawas	54.02	63.79	57.82
6. Musi Banyuasin	38.11	45.61	40.91
7. Banyuasin	31.78	58.14	42.73
8. OKU Selatan	18.20	54.12	32.35
9. OKU Timur	41.37	45.57	42.73
10. Ogan Ilir	32.89	43.87	37.57
71. Palembang	8.69	24.75	15.20
72. Prabumulih	24.82	35.06	29.28
73. Pagaralam	22.09	30.73	25.79
74. Lubuklinggau	17.88	22.29	19.46
Sumatera Selatan	32.36	45.78	37.63

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

7.2.3. Distribusi Sektoral Penyerapan Tenaga Kerja

Di Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2007 jumlah penduduk yang bekerja di sektor primer (pertanian) masih dominan, di mana 62,79 persen dari pekerja di Sumatera Selatan ditampung oleh sektor primer. Sementara sektor sekunder terutama industri yang merupakan primadona perekonomian Sumatera Selatan pada belum menunjukkan kontribusi yang berarti dalam hal penyerapan tenaga kerja. Sektor lainnya yang banyak digeluti oleh Penduduk Sumatera Selatan adalah sektor perdagangan dan jasa.

Tabel 7.9 Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006-2007

Lapangan Pekerjaan	2006			2007		
	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sektor Primer (A)						
Pertanian	65,52	62,42	64,47	62.89	60.65	62.02
Pertambangan	0,83	0,24	0,63	1.15	0.17	0.77
Sektor Sekunder (M)						
Industri	4,40	4,28	4,36	4.64	5.73	5.07
Listik, Gas, Air	0,11	0,03	0,08	0.23	0.17	0.21
Bangunan	3,79	0,29	2,61	5.10	0.20	3.19
Sektor Tersier (S)						
Perdagangan	8,26	18,54	11,73	8.98	17.85	12.44
Angkutan/Komunikasi	6,53	0,53	4,50	6.90	1.38	4.75
Keuangan	0,87	0,56	0,77	0.34	0.44	0.38
Jasa-jasa	9,69	13,10	10,84	9.77	13.40	11.18
Jumlah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	2.001.409	1.020.529	3.021.938	1,866,618	1,190,900	3,057,518

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

Kontribusi sektoral penyerapan tenaga kerja hampir sama antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Di mana hampir di seluruh kabupaten daya serap tenaga kerja masih didominasi oleh sektor pertanian, kecuali di Kota Palembang dominasi sektor tersier lebih terlihat. Sebagaimana diketahui, Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan, tentu saja kondisi perekonomiannya lebih maju dibanding kabupaten lainnya. Tampak sektor perekonomian moderen (sektor sekunder dan tersier) telah mendominasi penyerapan tenaga kerja.

Tabel 7.10 Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007

Kabupaten/Kota	Lapangan Usaha			Total	
	A	M	S	%	N
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Ogan Komering Ulu	64.07	5.84	30.09	100,00	106.255
2. Ogan Komering Ilir	77.00	9.04	13.96	100,00	343.127
3. Muara Enim	76.65	3.59	19.76	100,00	295.682
4. Lahat	74.14	4.22	21.64	100,00	263.853
5. Musi Rawas	82.18	2.76	15.06	100,00	233.277
6. Musi Banyuasin	81.20	4.60	14.20	100,00	222.942
7. Banyuasin	72.00	10.62	17.38	100,00	363.931
8. OKU Selatan	84.19	0.77	15.04	100,00	171.105
9. OKU Timur	69.71	10.21	20.08	100,00	249.389
10. Ogan Ilir	64.11	13.41	22.48	100,00	184.835
71. Palembang	3.25	17.57	79.18	100,00	451.704
72. Prabumulih	44.26	7.84	47.90	100,00	53.457
73. Pagaralam	67.82	3.53	28.65	100,00	56.981
74. Lubuklinggau	27.74	11.97	60.29	100,00	60.980
Sumatera Selatan	62.78	8.47	28.75	100,00	3.057.518

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

7.2.4. Jenis Pekerjaan/ Jabatan

Jenis pekerjaan utama masyarakat Sumatera Selatan adalah tenaga usaha pertanian, sebagaimana lapangan usaha utama penduduk adalah sektor pertanian. Lebih dari 60 persen penduduk Sumatera Selatan tahun 2007 bekerja sebagai tenaga usaha pertanian. Sementara jenis pekerjaan lainnya relatif mempunyai persentase yang cukup kecil. Setelah tenaga usaha pertanian, jenis pekerjaan yang paling besar adalah tenaga tenaga produksi, operator dan pekerja kasar (14,27 persen).

Tabel 7.11 Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 dan 2007

Jenis Pekerjaan		2006			2007		
		Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tenaga Profesional		2,54	6,44	3,86	3,35	6,97	4,76
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan		0,25	0,19	0,23	0,49	0,08	0,33
Pejabat Pelaksana dan TU		3,76	3,16	3,56	3,02	3,86	3,35
Tenaga Usaha Penjualan		11,10	16,96	13,08	7,69	16,22	11,01
Tenaga Usaha Jasa		2,42	5,47	3,45	3,46	4,88	4,01
Tenaga Usaha Pertanian		60,93	61,40	61,09	62,18	60,50	61,53
Tenaga Produksi, Operator dan Pekerja Kasar		2,73	4,22	3,23	18,69	7,33	14,27
Lainnya		16,27	2,15	11,51	1,12	0,16	0,74
Jumlah	% N	100,00 2.001.409	100,00 1.020.529	100,00 3.021.938	100,00 1.866.618	100,00 1.190.900	100,00 3.057.518

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

7.2.5. Status Pekerjaan

Menilik status pekerjaan, sangat sedikit penduduk yang bekerja sebagai pengusaha dengan buruh tetap (1,48 persen). Ini menunjukkan skala usaha penduduk yang umumnya masih rendah. Penduduk yang berstatus berusaha umumnya berusaha sendiri (15,96 persen) atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/art (25,32 persen). Status pekerjaan penting yang paling besar lainnya adalah sebagai pekerja tidak dibayar (24,87 persen).

Status pekerjaan pekerja laki-laki dan perempuan terlihat mempunyai pola yang berbeda. Pekerja laki-laki cenderung berstatus berusaha dibantu art/buruh tidak tetap sementara pekerja perempuan berstatus pekerja keluarga. Pola seperti ini merupakan cerminan dari kondisi sosial di mana laki-laki sebagai pemimpin keluarga juga merupakan pemimpin usaha sedangkan perempuan menjadi pembantu suami.

Tabel 7.12 Persentase Penduduk Yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 dan 2007

Jenis Pekerjaan		2006			2007		
		Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Berusaha sendiri		26,21	16,48	22,93	17,75	13,14	15,96
2. Berusaha dibantu art/ buruh tidak tetap		27,62	10,39	21,80	33,22	12,94	25,32
3. Bekerja dibantu buruh tetap		4,21	1,34	3,24	1,94	0,77	1,48
4. Buruh/karyawan		25,79	22,56	24,70	26,10	21,74	24,40
5. Pekerja bebas di pertanian		4,43	3,39	4,08	5,62	6,01	5,78
6. Pekerja bebas di non pertanian		1,97	0,93	1,62	2,94	1,02	2,19
7. Pekerja tidak Dibayar		9,77	44,92	21,64	12,43	44,38	24,87
Jumlah		%					
		N					
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2.001.409	1.020.529	3.021.938	1.866.618	1.190.900	3.057.518

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

7.3. Pembangunan Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja

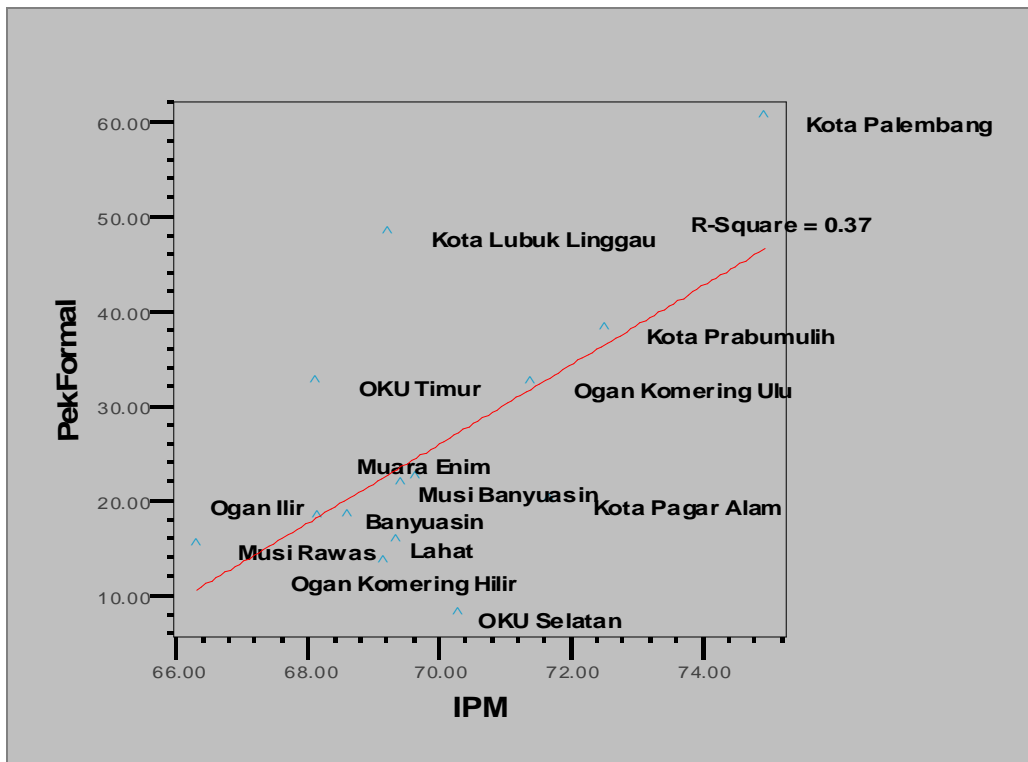
Baik di dalam kerangka teoritis maupun kerangka empiris telah banyak dibuktikan bahwa faktor tenaga kerja memiliki bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan. Bahkan faktor tenaga kerja tidak saja dipandang sebagai satu bagian unit dalam penciptaan output (produksi) tetapi juga bagaimana kualitas tenaga kerja tersebut berinteraksi dengan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan nilai tambah (produktivitas).

Dalam suatu sistem ekonomi yang sedang berkembang, bahkan yang sudah maju sekalipun, dualisme ekonomi merupakan masalah tersendiri. Di satu sisi sektor industri yang identik sebagai sektor yang padat modal memerlukan relatif sedikit tenaga kerja dengan kualitas yang lebih tinggi. Di sisi lain sektor pertanian yang juga dikenal sebagai sektor tradisional lebih bersifat padat karya. Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa pada hakekatnya pembangunan

manusia sebagai faktor tenaga kerja dalam suatu sistem ekonomi menjadi satu syarat mutlak bagi setiap sektor apapun.

Lebih jauh, pemahaman atas keterkaitan antara pembangunan manusia dengan indikator-indikator sosial dan ekonomi lainnya adalah mutlak sangat penting. Meningkatnya pembangunan manusia akan memberikan dampak positif terhadap kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang produktif, yaitu tenaga manusia yang sehat, berpendidikan dan terampil. SDM yang produktif juga berarti angkatan kerja yang handal dan mampu memanfaatkan dan dimanfaatkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan nilai tambah output dan produksi.

Gambar 7.3. Sumatera Selatan: IPM dan Persentase Pekerja Sektor Formal, 2007



Gambar 7.3 memperlihatkan hubungan antara pembangunan manusia dengan persentase pekerja di sektor formal-sebagai proksi tenaga kerja produktif, dengan unit analisis

tingkat kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Seperti yang diharapkan, hubungan antara IPM dan persentase pekerja di sektor formal adalah positif dan cukup kuat dengan *Pearson Correlation Coefficient r* sebesar 0,611 (lihat tabel 7,13). Hubungan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai IPM di suatu kabupaten/kota, akan semakin tinggi pula persentase pekerja sektor formal di kabupaten/kota tersebut. Sektor formal disini didefinisikan dengan pendekatan status bekerja sebagai 'berusaha dengan buruh tetap/buruh dibayar' dan 'buruh/karyawan/pegawai dengan majikan tetap'.

Tabel 7.13 *Pearson Correlation* IPM dan Persentase Pekerja Sektor Formal di Sumatera Selatan, Tahun 2007

		IPM	PekFormal
IPM	Pearson Correlation	1	.611
	Sig. (2-tailed)		.020
	N	14	14
PekFormal	Pearson Correlation	.611	1
	Sig. (2-tailed)	.020	
	N	14	14

Tingkat produktivitas pekerja yang relatif tinggi diharapkan akan sangat menunjang peningkatan produksi barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri, termasuk produksi komoditi pangan. Peningkatan produksi pangan ini pada gilirannya akan menjamin stok atau persediaan pangan Sumatera Selatan, bahkan pangan nasional, sebagai salah satu pilar penting dalam sistem ketahanan pangan yang menyeluruh dan terintegrasi. Lebih penting lagi, meningkatnya produktivitas pekerja secara langsung berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk dikarenakan membaiknya tingkat pendapatan. Dengan kata lain, membaiknya produktivitas pekerja bukan hanya berpengaruh positif terhadap peningkatan produksi barang, akan tetapi secara langsung berdampak pula pada pengurangan tingkat kemiskinan suatu daerah.

BAB 8 PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KETAHANAN PANGAN

8.1. Konsep Dasar Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan dikonseptualisasikan sebagai suatu sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan antara ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Sistem ini menjamin adanya ketersediaan pangan dengan distribusi yang merata dan harga terjangkau, dan sesuai dengan besarnya kebutuhan dan pola konsumsi penduduk. Ketiga komponen utama ini—ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan, merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam menjamin suatu kondisi ketahanan pangan yang mantap. Ketersediaan pangan sangat tergantung pada kemampuan produksi berbagai jenis makanan pokok di dalam negeri, dan pada perdagangan bahan makanan antar negara (ekspor dan impor), yang pada gilirannya mempengaruhi cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan saat sekarang maupun masa mendatang di seluruh negara. Ketika ketersediaan pangan terjamin, faktor krusial berikutnya adalah memastikan suatu distribusi pangan yang secara proporsional merata di seluruh wilayah negara dengan penetapan harga dasar eceran yang terjangkau oleh seluruh masyarakat.

Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama pembangunan, karena pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Sebagaimana disebutkan di atas, ketahanan pangan diartikan sebagai ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi oleh masyarakat untuk menopang aktivitasnya sepanjang waktu.

Secara nasional, kewajiban mewujudkan ketahanan pangan tertuang secara eksplisit dalam UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, di mana secara umum mengamanatkan bahwa Pemerintah bersama masyarakat berkewajiban mewujudkan ketahanan pangan nasional. Implementasi dari UU tersebut tertuang dalam: (i) PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan yang mengatur tentang Ketahanan Pangan yang mencakup ketersediaan pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, peran pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat, pengembangan

sumberdaya manusia dan kerjasama internasional; (ii) PP Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang mengatur pembinaan dan pengawasan di bidang label dan iklan pangan untuk menciptakan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab; dan (iii) PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, yang mengatur tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, pemasukan dan pengeluaran pangan ke wilayah Indonesia, pengawasan dan pembinaan, serta peranserta masyarakat mengenai hal-hal di bidang mutu dan gizi pangan.

Banyak indikator yang digunakan untuk melihat ketahanan pangan, namun beberapa di antaranya sulit diukur. Indikator yang baik mempunyai ciri: cukup sederhana untuk pengumpulan dan penafsirannya, objektif, dapat diukur dengan angka, dan responsive terhadap perubahan-perubahan akibat adanya program. Seharusnya indikator ketahanan pangan dapat merepresentasikan jumlah dan mutu pangan yang dikonsumsi sesuai norma gizi.

Salah satu indikator untuk melihat ketahanan pangan suatu wilayah adalah ketersediaan pangan yaitu tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Namun, indikator ini masih bersifat makro, karena bisa saja pangan tersedia, tapi tidak dapat diakses oleh masyarakat. Ketersediaan pangan merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan konsumsi, namun dinilai belum cukup. Untuk itu diperlukan pemahaman kinerja konsumsi pangan. Indikator yang dapat digunakan adalah tingkat partisipasi dan tingkat konsumsi pangan, keduanya menunjukkan tingkat aksesibilitas fisik dan ekonomi terhadap pangan (DKP, 2003). Walaupun pangan tersedia pada suatu wilayah, jika tidak dapat diakses masyarakat maka kinerjanya rendah. Aksesibilitas tersebut menggambarkan aspek pemerataan dan keterjangkauan. Karena menurut PP No.68/2002, pemerataan mengandung makna adanya distribusi pangan ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga, sedangkan keterjangkauan adalah keadaan di mana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif. Karena itu ukuran ketahanan pangan yang akan dikemukakan di sini meliputi pangsa pengeluaran pangan dan konsumsi energi dan protein.

8.2. Pangsa Pengeluaran Pangan

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi

pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau di tabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat di pakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan

Menurut Suhardjo (1996) dan Azwar (2004) pangsa pengeluaran pangan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan, makin besar pangsa pengeluaran untuk pangan berarti ketahanan pangan semakin berkurang. Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil, demikian sebaliknya (Deaton dan Muellbauer, 1980).

Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pengeluaran untuk konsumsi kelompok makanan masih relatif besar (mendekati 50%) dari total pengeluaran per kapita. Sebaliknya pada negara maju pengeluaran per kapita yang bersifat sekunder seperti aneka barang dan jasa yang mencakup pengeluaran untuk perawatan kesehatan, rekreasi, olah raga, pendidikan dan lain-lain, adalah merupakan bagian terbesar dari pengeluaran per kapita. Dengan demikian, proporsi pengeluaran untuk kelompok komoditi makanan dan non makanan adalah salah satu tolok ukur tingkat kesejahteraan suatu wilayah.

Secara umum proporsi pengeluaran makanan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan cenderung menurun dari waktu ke waktu. Pada Tabel 8.1 di bawah ini, terlihat pada tahun 1996 pangsa pangan mencapai 62,95 persen, meningkat menjadi 70,36 persen pada tahun 1999 sebagai akibat dari adanya krisis ekonomi di Indonesia sejak tahun 1998. Pangsa pengeluaran pangan kembali normal menjadi 63,75 persen pada tahun 2002 dan terus menurun menjadi 59,62 persen pada tahun 2005 dan 53,83 persen pada tahun 2007. Penurunan ini tentu saja di samping merupakan indikasi adanya peningkatan kesejahteraan penduduk sebagaimana disebutkan di atas, juga mengisyaratkan adanya perbaikan kondisi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga di Sumatera Selatan.

Tabel 8.1. Perkembangan Pangsa Pengeluaran Pangan Menurut Daerah Tempat Tinggal, Sumatera Selatan 1996 – 2007

Daerah	1996	1999	2002	2005	2007
Perkotaan	53,76	63,96	55,81	50,03	49,88
Pedesaan	70,23	74,28	71,64	68,32	57,33
Sumatera Selatan	62,95	70,36	63,75	59,62	53,83
<i>Indonesia</i>	<i>55,27</i>	<i>62,94</i>	<i>58,47</i>	<i>51,37</i>	<i>49,24</i>

Sumber: BPS, diolah dari data Susenas modul konsumsi, 1996, 1999, 2002, 2005 dan 2007.

Dibandingkan dengan kondisi nasional, pangsa pangan penduduk Sumatera Selatan lebih tinggi. Dengan kata lain tingkat kesejahteraan masyarakat Sumsel serta derajat ketahanan pangan masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Tabel 6.1. juga memperlihatkan bahwa dibandingkan daerah pedesaan, daerah perkotaan mempunyai pangsa pangan yang lebih rendah yang berarti bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan.

8.3. Konsumsi Energi dan Protein

Selain pangsa pangan, ketahanan pangan tingkat rumahtangga dapat dilihat dari kandungan gizi dalam konsumsi pangan rumahtangga. Berdasarkan norma gizi, secara garis besar konsumsi makanan yang menghasilkan tubuh yang sehat perlu mengandung unsur pangan seperti karbohidrat, protein, lemak dan vitamin/mineral dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Keseimbangan dalam mengkonsumsi berbagai jenis pangan akan mencerminkan kualitas konsumsi pangan rumahtangga. Menurut Widayakarya Pangan dan Gizi VII tahun 2004, angka kecukupan gizi di tingkat individu adalah untuk konsumsi kalori sebesar 2000 kkal/hari dan konsumsi protein sebesar 53 gram/hari.

Tabel 8.2 memberikan gambaran ringkas tentang perkembangan rata-rata konsumsi energi dan protein dari penduduk Indonesia selama 6 tahun terakhir ini. Secara umum, rata-rata kandungan energi dan protein yang dikonsumsi oleh penduduk Sumatera Selatan cenderung

meningkat pada periode 1999 – 2007. Peningkatan ini merupakan salah satu indikasi adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga derajat ketahanan pangan rumah tangga. Sebagaimana disebutkan di atas, sejalan dengan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat maka kandungan gizi dari konsumsi pangan juga akan meningkat. Dibandingkan dengan standar kecukupan gizi sesuai WNPG VIII, konsumsi energi dan protein penduduk Sumatera Selatan pada tahun 2007 telah melebihi standar kecukupan energi dan protein.

Tabel 8.2 . Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein Per Hari Per Kapita, Sumatera Selatan 1996 – 2007

Konsumsi Energi dan Protein	1996	1999	2002	2005	2007
A. ENERGI (kilo kalori)					
Perkotaan	2.008,5	1.828,7	1.864,5	1.905,8	2.004,8
Pedesaan	2.173,8	1.918,6	2.002,8	2.035,0	2.091,9
Sumatera Selatan	2.123,6	1.891,1	1.953,9	1.990,3	2.058,2
<i>Indonesia</i>	<i>2.019,8</i>	<i>1.849,4</i>	<i>1.985,7</i>	<i>2.007,7</i>	<i>2.014,9</i>
B. PROTEIN (gram)					
Perkotaan	57,28	47,42	51,80	56,05	60,37
Pedesaan	55,54	47,02	49,02	53,69	56,85
Sumatera Selatan	56,06	47,14	50,00	54,51	58,21
<i>Indonesia</i>	<i>54,49</i>	<i>48,67</i>	<i>54,42</i>	<i>56,59</i>	<i>57,66</i>

Sumber: BPS, diolah dari data Susenas modul konsumsi, 1996, 1999, 2002, 2005 dan 2007.

Konsumsi energi jauh lebih tinggi dikonsumsi oleh penduduk pedesaan dari penduduk perkotaan. Sedangkan protein cenderung sedikit lebih banyak dikonsumsi oleh penduduk perkotaan dari pada mereka yang tinggal di pedesaan. Namun demikian, pada tahun 2007 baik di perkotaan maupun pedesaan konsumsi energi dan protein penduduk telah melebihi standar kecukupan energi dan protein nasional.

Maxwell dan Frankenberger (1992) menggabungkan pangsa pangan dan kecukupan energi untuk mengklasifikasikan ketahanan pangan rumahtangga menjadi empat kategori yaitu tahan pangan, rentan pangan, kurang pangan dan rawan pangan. Batasan yang digunakan adalah 80 persen dari standar kecukupan energi dikombinasikan dengan pangsa pengeluaran pangan 60 persen dari total pengeluaran rumahtangga. Rumahtangga yang mempunyai pangsa pangan 60 persen ke bawah dan kecukupan energi di atas 80 persen dikategorikan rumahtangga tahan pangan, jika pangsa pangan di atas 60 persen dan konsumsi energi di atas 80 persen dikategorikan rentan pangan, jika pangsa pangan 60 persen ke bawah dan kecukupan energi 80 persen ke bawah dikategorikan kurang pangan serta rumahtangga yang mempunyai pangsa pangan di atas 60 persen dan kecukupan energi 80 persen ke bawah dikategorikan rawan pangan.

Tabel 8.3. Ketahanan Pangan Tingkat Rumahtangga di Sumatera Selatan 2007: Pangsa Pangan dan Kecukupan Energi

Kecukupan Energi	Pangsa Pangan	
	< 60 Persen	>= 60 Persen
> 80 Persen	Tahan Pangan: N = 538.123 % = (34,37)	Rentan Pangan: N = 691.313 % = (44,15)
<= 80 Persen	Kurang Pangan: N = 154.629 % = (9,88)	Rawan Pangan: N = 181.594 % = (11,60)

Sumber: BPS, diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

Rumahtangga tahan pangan memiliki kemampuan untuk mencukupi konsumsi energi selain karena mempunyai akses yang tinggi secara ekonomi juga memiliki akses secara fisik. Rumahtangga yang rentan pangan mempunyai kondisi di mana terpenuhi standar kecukupan energi dalam rumahtangga namun pendapatan rumahtangga relatif rendah sehingga berpotensi menjadi kekurangan pangan (akses ekonomi yang rendah). Sedangkan dengan kondisi kurang pangan mempunyai akses secara ekonomi tetapi mempunyai akses yang rendah

secara fisik terhadap pangan. Rumahtangga rawan pangan mempunyai akses yang rendah terhadap pangan baik secara fisik maupun secara ekonomi.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka rumahtangga di Sumatera Selatan pada tahun 2007 terkategori sebagai berikut: 34,37 persen adalah rumahtangga tahan pangan, 44,15 persen rumahtangga rentan pangan, 9,88 persen rumahtangga kurang pangan dan 11,60 persen rumahtangga rawan pangan.

8.4. Pembangunan Manusia dan Ketahanan Pangan

Pembangunan manusia sering diartikan sebagai suatu proses untuk memperluas kesempatan dan pilihan-pilihan bagi manusia untuk mampu hidup lebih baik. Pilihan-pilihan ini meliputi terjaminnya sumber pendapatan yang ajeg, kondisi kesehatan yang prima, pendidikan yang memadai, lingkungan fisik yang kondusif, dan adanya kebebasan untuk bertindak. Sedangkan

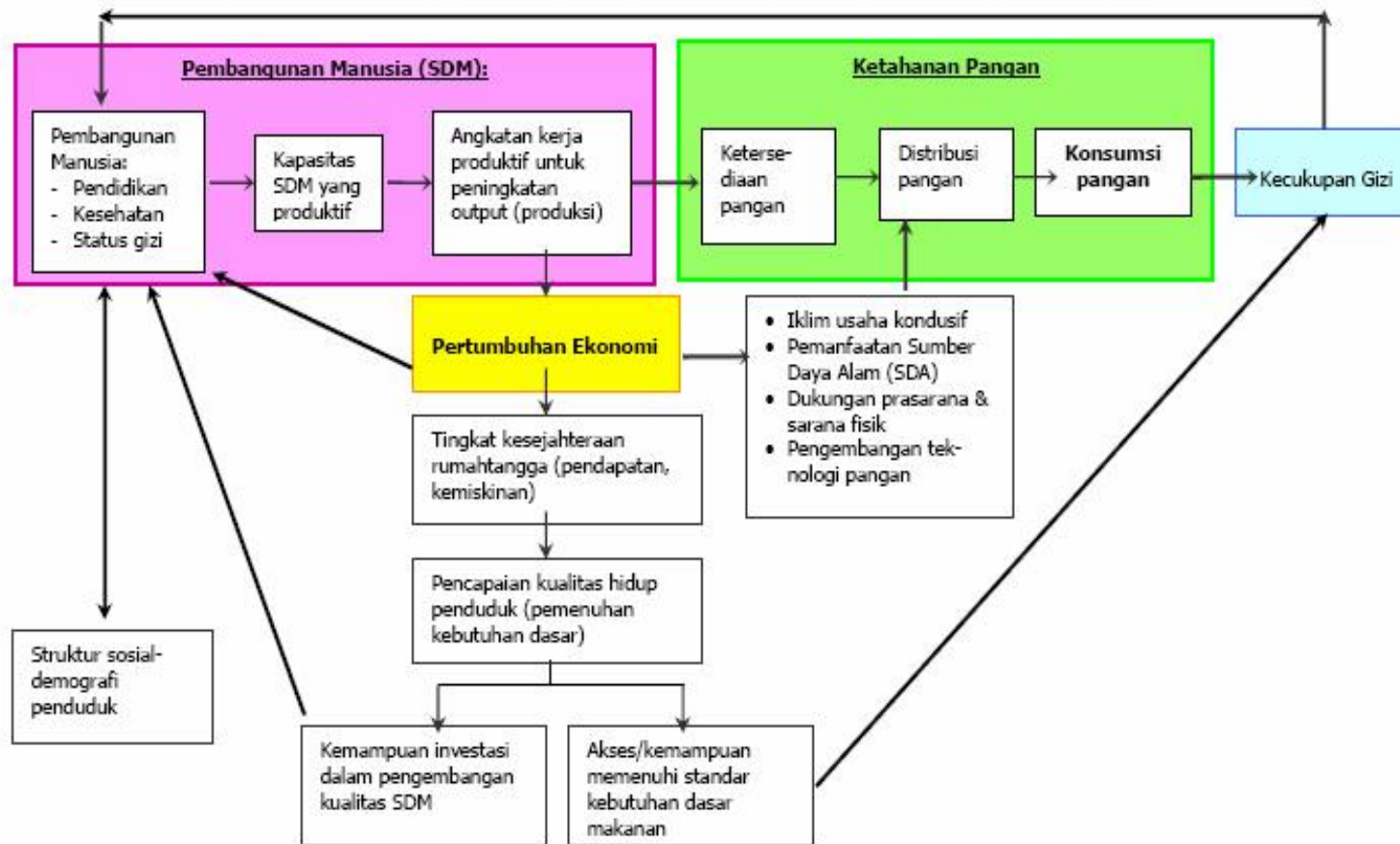
Keterkaitan antara pembangunan manusia dan ketahanan pangan memang tidak dapat diartikan sebagai suatu hubungan sebab-akibat yang bersifat searah dan langsung. Hubungan keduanya cenderung kompleks dan berdimensi banyak. Diagram 1 mencoba untuk menggambarkan suatu konsep hipotesis tentang sistem ketahanan pangan dikaitkan dengan pembangunan manusia (SDM), pencapaian kualitas hidup dan kecukupan gizi. Konsep ini menjelaskan bahwa pengembangan SDM yang diindikasikan oleh peningkatan pendidikan, dan membaiknya kondisi kesehatan dan gizi dari penduduk di suatu negara akan diikuti dengan perbaikan tingkat produktivitas angkatan kerja dalam menghasilkan output atau produksi. Pemanfaatan dari meningkatnya produktivitas ini dapat ditinjau baik dari sisi makro nasional maupun tingkat mikro individual rumahtangga dan masyarakat.

Dari pendekatan makro nasional, membaiknya tingkat produktivitas angkatan kerja mempengaruhi peningkatan produksi pangan dalam negeri dan perdagangan ekspor-impor komoditi pangan, melalui peranan para pelaku ekonomi di sektor pertanian dan perdagangan. Pada gilirannya, peningkatan produktivitas untuk menghasilkan produksi dan perdagangan pangan dapat menjamin ketersediaan pangan nasional. Kapasitas SDM yang produktif juga merupakan faktor kunci dalam kaitannya dengan upaya-upaya untuk memperbaiki distribusi pangan yang merata untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dari seluruh penduduk.

Mekanisme pengembangan SDM dalam kaitannya dengan membangun sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan secara langsung memberikan kontribusi pada tercapainya suatu kecukupan gizi bagi seluruh masyarakat di suatu negara, yang pada gilirannya akan menjamin pengembangan SDM yang produktif.

Dari sisi mikro individual rumah tangga dan masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan produktivitas angkatan kerja merangsang peningkatan pendapatan penduduk melalui pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendapatan yang membaik merupakan faktor fundamental untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, yang sekaligus untuk menurunkan insiden kemiskinan. Kondisi ini pada gilirannya akan mempengaruhi pencapaian kualitas hidup. Kualitas atau standar hidup yang layak diartikan sebagai kemampuan suatu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, baik untuk kebutuhan dasar makanan yang bergizi, maupun untuk investasi pendidikan dan kesehatan bagi seluruh anggota keluarga—khususnya generasi berikutnya. Kemampuan memenuhi standar kebutuhan dasar makanan juga berarti terjaminnya daya beli dari individu-individu rumah tangga dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengamankan persediaan dan konsumsi pangan secara ajek. Sedangkan kemampuan individu-individu rumah tangga untuk investasi pendidikan dan kesehatan akan selanjutnya mendasari pengembangan SDM yang berkualitas.

Gambar 8.1
 Diagram 1. Peranan Pembangunan Manusia dalam Kerangka Pemantapan Ketahanan Pangan



Kesenjangan nilai IPM antar kabupaten/kota setidaknya mencerminkan adanya perbedaan pada pemanfaatan hasil pembangunan ekonomi dan sosial selama ini yang dapat dinikmati oleh seluruh penduduk. Oleh karena itu, tinggi rendahnya nilai IPM di suatu wilayah diharapkan dapat mengukur tingkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh di wilayah tersebut. Namun dalam kenyataannya, tidak semua dari tiga dimensi yang digunakan senantiasa dapat menggambarkan kemajuan pembangunan manusia secara bersamaan. Sementara di beberapa wilayah kemajuan di bidang ekonomi seiring dengan kemajuan di bidang sosial, di wilayah-wilayah lainnya kemajuan pembangunan sosial justru memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian pembangunan manusia dari pada kemajuan di bidang ekonomi. Ketika sistem sentralisasi dianut, kebijakan pembangunan regional pada prinsipnya adalah bagian yang melekat dari kebijakan nasional baik di bidang ekonomi maupun sosial.

Oleh karena itu, peranan kebijakan pembangunan regional saat itu dalam memajukan pembangunan manusia khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan pada dasarnya tidak berbeda antar daerah. Perbedaan yang mungkin terjadi antar wilayah adalah adanya variasi pada akses dan kesempatan terhadap lapangan kerja dan sumber-sumber penghasilan bagi penduduk di daerah-daerah yang berbeda. Namun begitu, kemajuan pembangunan manusia antar wilayah akan mempunyai pola yang berbeda di era otonomi daerah saat ini, mengingat kapasitas sumber daya ekonomi antar daerah beragam untuk investasi di bidang pembangunan manusia, khususnya sektor publik—kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, sanitasi dan infrastruktur sosial lainnya.

Selanjutnya, seperti yang digambarkan pada Gambar 8.1, membaiknya tingkat kesejahteraan rumahtangga akan mendukung tercapainya kualitas/standar hidup yang layak. Standar hidup yang layak berarti adanya kemampuan finansial bagi rumahtangga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, termasuk kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota rumahtangga, khususnya anak-anak. Kemampuan untuk membiayai pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi anggota rumahtangga juga berarti investasi dalam pengembangan kualitas SDM di masa mendatang. Sedangkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, jika terjadi secara merata di antara sebagian besar rumahtangga di suatu negara atau

wilayah, akan menjamin daya beli yang ajeg dari individu-individu rumahtangga dan masyarakat secara keseluruhan, yang diperlukan untuk mengamankan konsumsi pangan yang stabil. Sebagai salah satu dari tiga komponen sistem ketahanan pangan, adanya kemampuan atau daya beli masyarakat untuk belanja konsumsi kebutuhan pangan merupakan simpul krusial untuk menjamin pemanfaatan stok pangan yang telah dibangun, dan pada gilirannya kondisi ini akan menciptakan suatu sistem ketahanan pangan yang stabil dan berkelanjutan.

Tabel 8.4. menyajikan hubungan antara beberapa indikator ketahanan pangan dengan IPM Sumatera Selatan. Secara umum terlihat bahwa ada keterkaitan antara IPM dengan ketahanan pangan rumahtangga di Sumatera Selatan, di mana kenaikan/penurunan IPM sejalan dengan naik/turunnya indikator ketahanan pangan tersebut pada periode 1996 – 2007.

Tabel 8.4. Beberapa Indikator Ketahanan Pangan dan IPM Sumatera Selatan 1996 - 2007

Indikator	1996	1999	2002	2005	2007
Pangsa Pangan	62,95	70,36	63,75	59,62	53,83
Konsumsi Energi	2.123,6	1.891,1	1.953,9	1.990,3	2.058,2
Konsumsi Protein	56,06	47,14	50,00	54,51	58,21
IPM	68,00	63,90	66,00	70,20	71,40

Sumber: BPS

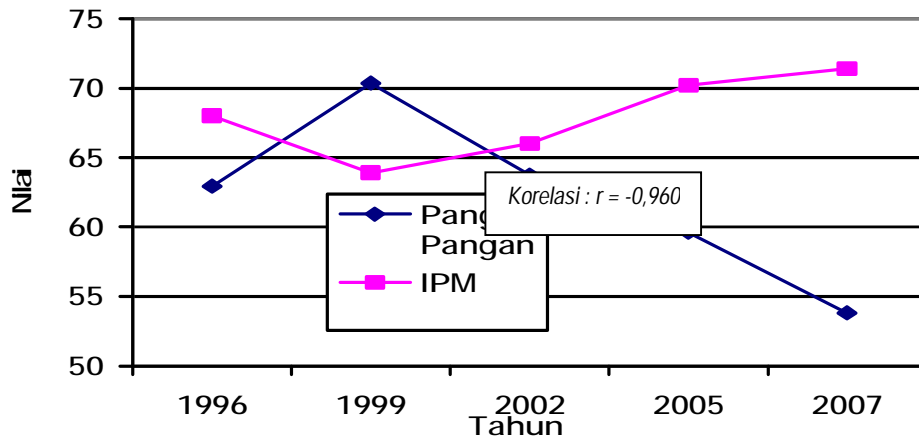
Agar hubungan antara IPM dan ketahanan pangan nampak lebih jelas, masih-masing indikator ketahanan pangan di atas dihubungkan dengan IPM dalam sebuah grafik yang terpisah yaitu pada Gambar 8.2., Gambar 8.3. dan Gambar 8.4. di bawah ini.

Hubungan antara IPM dengan pangsa pangan berbanding terbalik, di mana jika pangsa pangan naik maka IPM akan turun, sebaliknya jika pangsa pangan turun maka IPM naik. Hubungan antara IPM dan pangsa pangan tersebut sangat kuat di mana korelasi antara keduanya sebesar -0,960.

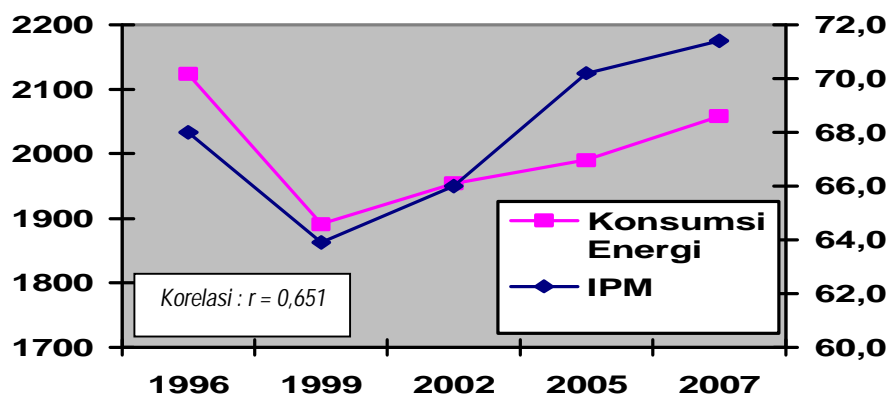
Hubungan antara IPM dengan konsumsi energi maupun konsumsi protein berbanding lurus, di mana jika konsumsi energi dan protein naik maka IPM akan naik, demikian juga jika

konsumsi energi dan protein turun maka IPM juga turun. Hubungan antara IPM dan konsumsi energi dan protein tersebut juga sangat kuat di mana korelasi keduanya dengan IPM masing-masing sebesar 0,651 dan 0,927.

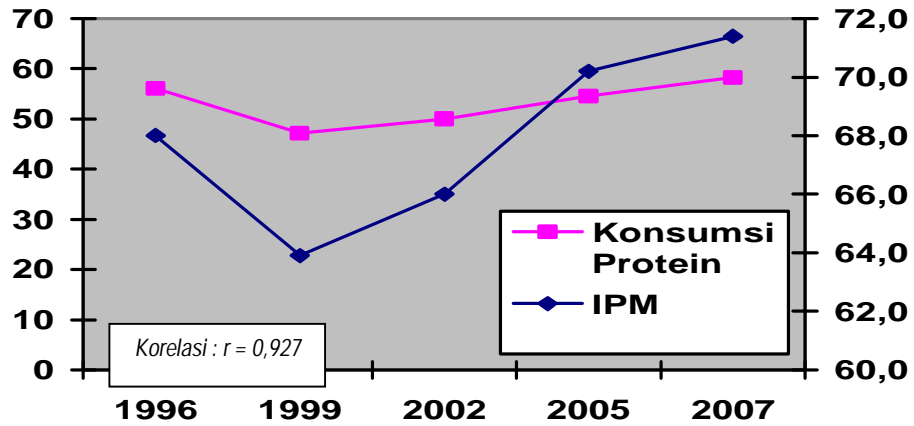
Gambar 8.2. Hubungan antara IPM dan Pangsa Pangan, Sumatera Selatan



Gambar 8.3. Hubungan antara IPM dan Konsumsi, Sumatera Selatan



Gambar 8.4. Hubungan antara IPM dan Konsumsi Protein, Sumatera Selatan



Dengan demikian dapat disimpulkan antara ketahanan pangan dan IPM terdapat hubungan yang sangat kuat satu sama lain di mana pembangunan manusia pada akhirnya akan memperkuat kondisi ketahanan pangan masyarakat sebagaimana dijelaskan pada diagram di atas. Demikian juga, terciptanya ketahanan pangan yang kokoh di masyarakat akan menunjang pencapaian pembangunan manusia yang berkualitas.

BAB 9

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

9.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara absolut, IPM Propinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan yaitu dari 70.2 pada tahun 2005 menjadi 70.1 pada tahun 2007. Namun demikian, dari sisi upaya meningkatkan nilai IPM untuk mendekati angka ideal nya (100) terlihat penurunan. Hal ini tampak dari menurunnya angka reduksi shortfall dari 2.99 pada periode 2005-2006 menjadi 1.06 pada periode 2006-2007.
2. Akibatnya posisi IPM Sumatera Selatan tidak mengalami perubahan dari sejak tahun 2005, yaitu tetap pada posisi 13 dari 33 propinsi. Artinya dari sisi upaya untuk percepatan pencapaian IPM ideal masih kalah cepat dengan propinsi lainnya selama kurun waktu 2005-2007.
3. Penurunan tingkat percepatan pencapaian IPM ideal di propinsi Sumatera Selatan dipengaruhi oleh penurunan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Timur (dari 6.07 menjadi 1.97), , Ogan Komering Ulu Selatan (dari 3.85 menjadi 0.95) dan Ogan Komering Ulu (dari 3.19 menjadi 1.86). Sebaliknya, di Kabupaten Musi Banyuasin terjadi peningkatan percepatan yang sangat signifikan dari 0.89 menjadi 2.13.
4. Dari sisi tingkat pendidikan, penduduk usia 10 tahun ke atas di propinsi Sumatera Selatan rata-rata pendidikannya hanya sampai tingkat SMP kelas 2 saja, hal ini tercermin dari rata-rata lama sekolah yang hanya mencapai 8.98 pada tahun 2007.
5. Hal ini sejalan dengan rendahnya persentase penduduk yang berijazah SMU ke atas, yaitu hanya 4.06 persen.

6. Pada anak usia sekolah 16-18 tahun atau pada tingkat SMU/SMK yang tercatat sebagai siswa atau berstatus sekolah juga hanya sekitar 53 persen, artinya separoh dari penduduk usia 16-18 tahun tidak dapat bersekolah. Tampaknya sekolah masih merupakan kebutuhan "mewah" bagi sebagian masyarakat kita. Mereka lebih memilih berhenti sekolah dan akhirnya membantu orangtua untuk mencari nafkah.
7. Dari sisi kesehatan, juga tercermin masih rendahnya derajat kesehatan penduduk Sumatera Selatan, di mana masih terdapat 25 persen balita yang penolong kelahirannya adalah dukun. Mayoritas masih menggunakan bidan (61.16%).
8. Masih tingginya kelahiran yang ditolong oleh dukun menyebabkan masih tingginya angka kematian bayi di Sumatera Selatan, yaitu mencapai 42 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita yang mencapai 52 per 1000 anak usia balita.
9. Derajat kesehatan juga dipengaruhi oleh sumber air minum penduduk. Di Sumatera Selatan masih ada 24.58 persen rumahtangga yang menggunakan sumber air minum yang jaraknya ke penampungan tinjak kurang dari 10 meter sehingga air yang di minum tidak higienis. Bahkan masih banyak penduduk di beberapa kabupaten/kota yang menggunakan sumur tidak terlindung sebagai sumber air minum.
10. Pembangunan manusia mempunyai hubungan positif yang cukup kuat dengan kemiskinan, produktifitas tenaga kerja, dan ketahanan pangan rumahtangga.
11. Semakin membaiknya tingkat produktifitas tenaga kerja akan memberikan kontribusi positif pada peningkatan output, termasuk produksi komoditi pangan.
12. Pekerja yang semakin produktif juga menjadi syarat utama pertumbuhan ekonomi yang mantab dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup penduduk.

9.2. Implikasi Kebijakan

Dari capaian IPM dan kondisi komponen-komponen IPM serta tingkat kemiskinan yang terjadi, nampaknya pembangunan yang selama ini dijalankan baru terlihat secara fisik. Manusia sebagai pelaku dan sasaran masih kurang mendapat perhatian yang memadai. Padahal pada hakekatnya pembangunan yang dilakukan seharusnya adalah pembangunan manusia. Untuk mencapai pembangunan yang dapat memenuhi hak-hak dasar manusia seperti kecukupan pangan, pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dasar yang baik dan rasa aman serta terlindungi bagi setiap warganegara diperlukan upaya yang tidak ringan. Tidak hanya komitmen pemerintah daerah tetapi juga bagaimana implementasi dari program-program yang telah dicanangkan.

Beberapa strategi yang dapat disarankan dalam hal pemberantasan kemiskinan dan pembangunan sosial antara lain:

1. **Akselerasi pertumbuhan ekonomi.** Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu senjata yang cukup ampuh untuk meningkatkan standar hidup. Namun yang harus menjadi perhatian adalah faktor pemerataan
2. **Memperbaiki distribusi pendapatan dan kesejahteraan.** Seringkali distribusi pendapatan menjadi hal yang terlupakan. Meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan akan mengurangi sejumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari pertumbuhan.
3. **Akselerasi pembangunan sosial pada bidang pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.**

Beberapa hal yang dapat ditempuh dalam bidang pendidikan antara lain meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar sampai tingkat SMU/SMK dengan target utama daerah dan masyarakat miskin, terpencil dan terisolasi. Sedangkan dalam bidang kesehatan misalnya dapat ditempuh dengan program program berikut, terutama untuk rakyat miskin dan pada lokasi-lokasi terpencil dan terisolir. Program-program

yang dapat dilaksanakan antara lain pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil/ menyusui melalui posyandu, pemberian alat kontrasepsi gratis pada wanita usia subur, pelayanan kesehatan dasar secara cuma-cuma dan peningkatan cakupan pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil.. Demikian juga faktor sanitasi yang harus menjadi perhatian utama untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk, yakni program air bersih. Dari paparan di atas masih banyak masyarakat yang belum dapat mengakses air bersih untuk kebutuhan minumannya. Penurunan tingkat kemiskinan dapat dicapai apabila kaum miskin dapat diberdayakan secara produktif, misalnya dengan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan mereka. Upaya-upaya tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan. Ketika suatu rumah tangga memiliki jaminan pendapatan yang reguler melalui pemanfaatan tenaga kerja mereka dan anggota rumah tangganya cukup terdidik dan sehat maka standar hidup minimal pasti terpenuhi dan kemiskinan akan berkurang.

Lampiran 1

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 2006 – 2008

Provinsi/ Kabupaten/Kota	IPM			Peringkat Nasional			Peringkat IPM se Sumsel			Reduksi Shortfall	
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005-2006	2006-2007
16. Sumatera Selatan	70,2	71.09	71.40	13	13	13				2.99	1.06
01. Ogan Komering Ulu	69,9	70.86	71.40	172	163	175	3	4	4	3.19	1.86
02. Ogan Komering Ilir	68,8	69.03	69.15	221	242	274	6	7	10	0.74	0.40
03. Muara Enim (liot)	68,7	69.14	69.42	228	237	249	8	6	7	1.41	0.91
04. Lahat	67,6	68.43	69.35	271	274	254	9	9	8	2.56	2.92
05. Musi Rawas	65,0	65.65	66.31	367	388	387	14	15	15	1.86	1.92
06. Musi Banyuasin	68,7	68.98	69.64	223	246	239	7	8	6	0.89	2.13
07. Banyuasin	67,2	68.05	68.60	289	295	298	10	10	11	2.59	1.71
08. Ogan Komering Ulu Selatan	68,8	70.00	70.28	219	197	209	5	5	5	3.85	0.95
09. Ogan Komering Ulu Timur	65,4	67.50	68.14	357	315	319	13	12	13	6.07	1.97
10. Ogan Ilir	66,0	67.24	68.17	334	327	317	12	13	12	3.65	2.84
11. Empat Lawang	*	66.59	67.17	*	359	362	*	14	14	*	1.75
71. Kota Palembang	73,6	74.35	74.94	59	53	50	1	1	1	2.84	2.30
72. Kota Prabumulih	71,1	71.70	72.51	132	130	117	2	2	2	2.08	2.85
73. Kota Pagar Alam	69,9	71.06	71.70	173	156	148	4	3	3	3.85	2.20
74. Kota Lubuk Linggau	66,3	67.97	69.24	325	298	265	11	11	9	4.96	3.97

Keterangan : * = masih tergabung dalam kabupaten induk=

Lampiran 2

ANGKA HARAPAN HIDUP TAHUN 2005 – 2007

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)			Peringkat Angka Harapan Hidup se Sumatera Selatan		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
16. Sumatera Selatan	68,3	68.80	69.00			
01. Ogan Komering Ulu	68,8	69.00	69.10	5	5	5
02. Ogan Komering Ilir	66,9	67.10	67.33	10	8	8
03. Muara Enim (liot)	66,6	66.90	67.09	11	10	10
04. Lahat	66,8	66.90	67.24	8	9	9
05. Musi Rawas	63,2	64.00	64.14	14	15	15
06. Musi Banyuasin	68,7	68.80	69.07	6	6	6
07. Banyuasin	66,6	66.70	66.88	9	11	11
08. Ogan Komering Ulu Selatan	68,9	69.10	69.16	4	4	4
09. Ogan Komering Ulu Timur	67,8	68.10	68.16	7	7	7
10. Ogan Ilir	64,8	65.10	65.40	12	12	12
11. Empat Lawang	*	65.00	65.14	*	14	14
71. Kota Palembang	69,9	70.20	70.43	2	2	2
72. Kota Prabumulih	70,0	70.30	70.71	1	1	1
73. Kota Pagar Alam	69,2	69.30	69.52	3	3	3
74. Kota Lubuk Linggau	64,7	65.10	65.24	13	13	13

Keterangan : * = masih tergabung dalam kabupaten induk=

Lampiran 3

ANGKA MELEK HURUF DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH TAHUN 2005-2007

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf (persen)			Peringkat Se- Sumatera Selatan			Rata-rata Lama Sekolah (tahun)			Peringkat Se- Sumatera Selatan		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
16. Sumatera Selatan	95,9	96.59	96.66				7,5	7.60	7.60			
01. Ogan Komering Ulu	95,1	97.21	97.68	8	8	6	7,0	7.10	7.57	7	7	6
02. Ogan Komering Ilir	94,7	94.65	94.65	10	14	14	6,7	6.70	6.70	12	13	15
03. Muara Enim (liot)	98,8	98.80	98.80	1	1	1	7,3	7.30	7.30	5	5	8
04. Lahat	96,0	96.91	97.20	5	9	9	7,1	7.20	7.59	6	6	5
05. Musi Rawas	95,5	95.51	96.50	7	13	11	6,9	7.00	7.00	10	10	10
06. Musi Banyuasin	95,9	95.90	95.90	6	11	13	6,8	6.80	6.80	11	11	13
07. Banyuasin	93,5	95.93	95.93	13	10	12	7,0	7.00	7.00	8	9	11
08. Ogan Komering Ulu Selatan	93,7	97.49	97.49	12	5	7	6,9	7.10	7.10	9	8	9
09. Ogan Komering Ulu Timur	91,2	94.47	94.63	14	15	15	6,5	6.80	6.80	14	12	14
10. Ogan Ilir	94,2	97.24	97.24	11	7	8	6,6	6.60	7.36	13	14	7
11. Empat Lawang	*	95.80	96.75	*	12	10	*	6.50	6.88	*	15	12
71. Kota Palembang	97,7	98.63	98.63	2	2	2	9,7	9.90	9.90	1	1	1
72. Kota Prabumulih	97,7	97.70	97.90	3	4	4	8,3	8.40	8.88	2	2	3
73. Kota Pagar Alam	97,2	97.38	97.82	4	6	5	8,0	8.40	8.42	3	3	4
74. Kota Lubuk Linggau	95,0	98.03	98.03	9	3	3	7,6	7.80	8.98	4	4	2

Keterangan : * = masih tergabung dalam kabupaten induk=

Lampiran 4

DAYA BELI TAHUN 2005 – 2007

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan (Rp. 000)			Peringkat se Sumatera Selatan		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
16. Sumatera Selatan	610,3	615.30	617.59			
01. Ogan Komering Ulu	610,5	613.89	614.32	3	3	3
02. Ogan Komering Ilir	613,2	614.96	614.97	2	2	2
03. Muara Enim (liot)	596,4	600.09	602.42	6	7	9
04. Lahat	590,6	597.41	602.32	11	11	10
05. Musi Rawas	587,1	588.13	592.80	13	14	15
06. Musi Banyuasin	594,9	597.60	604.22	9	10	7
07. Banyuasin	595,4	598.62	604.41	7	9	5
08. Ogan Komering Ulu Selatan	599,6	601.15	604.40	4	6	6
09. Ogan Komering Ulu Timur	573,9	587.50	594.94	14	15	14
10. Ogan Ilir	595,0	599.74	602.32	8	8	11
11. Empat Lawang	*	597.10	597.30	*	12	13
71. Kota Palembang	616,8	619.46	625.44	1	1	1
72. Kota Prabumulih	597,1	601.45	603.81	5	4	8
73. Kota Pagar Alam	591,5	601.35	606.52	10	5	4
74. Kota Lubuk Linggau	587,4	595.32	599.50	12	13	12

Keterangan : * = masih tergabung dalam kabupaten induk=

Lampiran 5

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN KELOMPOK UMUR SEKOLAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, TAHUN 2007

Provinsi/ Kabupaten/Kota	07 - 12	13 - 15	16 - 18
01. Ogan Komering Ulu	94.65	86.18	55.78
02. Ogan Komering Ilir	97.47	68.97	33.14
03. Muara Enim (liot)	97.72	83.42	43.45
04. Lahat	97.42	91.26	59.36
05. Musi Rawas	98.06	84.98	46.86
06. Musi Banyuasin	95.70	77.34	40.62
07. Banyuasin	95.90	83.18	55.41
08. Ogan Komering Ulu Selatan	96.60	87.40	49.89
09. Ogan Komering Ulu Timur	98.94	78.76	59.08
10. Ogan Ilir	96.58	77.01	53.26
11. Empat Lawang	98.05	84.56	46.73
71. Kota Palembang	99.14	93.82	71.36
72. Kota Prabumulih	97.09	89.61	67.17
73. Kota Pagar Alam	98.92	96.13	53.56
74. Kota Lubuk Linggau	96.55	88.65	53.22
Sumatera Selatan	97.43	83.85	53.49

Sumber: BPS, Susenas 2007

Lampiran 6

PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KEATAS MENURUT KABUPATEN/KOTA, JENIS KELAMIN DAN IJAZAH TERTINGGI YANG DIMILIKI, PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2007

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Ijazah/STTB yang Dimiliki					Total
	Tidak Mempunyai Ijazah	SD/MI/ Sederajat	SLTP/ MTs/ Sederajat	SMU sederajat	SMU +	
01. Ogan Komering Ulu	27.16	32.29	17.68	18.77	4.10	100
02. Ogan Komering Ilir	32.90	38.23	17.49	9.85	1.53	100
03. Muara Enim (liot)	28.13	38.74	16.93	14.25	1.95	100
04. Lahat	26.91	30.65	19.46	19.89	3.09	100
05. Musi Rawas	28.16	45.52	14.05	10.59	1.68	100
06. Musi Banyuasin	33.84	37.58	16.63	9.92	2.03	100
07. Banyuasin	28.99	37.94	16.53	13.47	3.07	100
08. Ogan Komering Ulu Selatan	28.08	40.36	18.49	12.00	1.07	100
09. Ogan Komering Ulu Timur	32.91	35.66	18.94	11.15	1.34	100
10. Ogan Ilir	26.96	35.51	17.69	16.15	3.69	100
11. Empat Lawang	32.52	33.37	17.79	14.61	1.71	100
71. Kota Palembang	16.37	21.21	20.11	32.62	9.69	100
72. Kota Prabumulih	19.77	27.17	17.39	27.54	8.13	100
73. Kota Pagar Alam	19.83	32.00	18.09	26.07	4.01	100
74. Kota Lubuk Linggau	18.39	28.70	19.93	23.98	9.00	100
Sumatera Selatan	26.52	33.69	17.93	17.8	4.06	100

Sumber: BPS, Susenas 2007

Lampiran 7

**PERSENTASE BALITA MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN PENOLONG KELAHIRAN TERAKHIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2007**

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Penolong Kelahiran					
	Dokter	Bidan	Tenaga Medis Lain	Dukun	Famili	Lainnya
01. Ogan Komering Ulu	9,94	66,92	1,41	18,56	3,17	-
02. Ogan Komering Ilir	5,45	64,37	0,78	29,01	0,39	-
03. Muara Enim (liot)	10,51	59,22	0,43	28,97	0,45	0,43
04. Lahat	6,60	42,47	0,39	43,85	6,69	-
05. Musi Rawas	4,51	53,59	0,41	41,08	0,41	-
06. Musi Banyuasin	4,63	50,87	0,66	41,53	1,97	0,33
07. Banyuasin	7,94	75,59	1,00	14,47	-	1,00
08. Ogan Komering Ulu Selatan	4,00	39,48	0,41	52,08	3,63	0,40
09. Ogan Komering Ulu Timur	9,09	61,41	2,86	26,63	-	-
10. Ogan Ilir	8,15	54,61	1,03	35,12	1,10	-
11. Empat Lawang	2,22	54,85	-	42,93	-	-
71. Kota Palembang	26,10	68,74	0,65	3,87	0,32	0,32
72. Kota Prabumulih	28,41	61,05	0,46	10,08	-	-
73. Kota Pagar Alam	9,92	74,56	0,54	10,76	4,22	-
74. Kota Lubuk Linggau	21,26	69,84	0,47	7,50	0,93	-
Sumatera Selatan	11,48	61,16	0,84	25,16	1,11	0,26

Sumber: BPS, Susenas 2007

Lampiran 8

PERSENTASE PENDUDUK YANG MENGALAMI KELUHAN KESEHATAN DALAM SEBULAN YANG LALU
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN, TAHUN 2007

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan
(1)	(2)
1. Ogan Komering Ulu	35,14
2. Ogan Komering Ilir	26,88
3. Muara Enim	25,28
4. Lahat	36,57
5. Musi Rawas	31,75
6. Musi Banyuasin	36,13
7. Banyuasin	24,91
8. OKU Selatan	33,45
9. OKU Timur	33,41
10. Ogan Ilir	43,23
11. Empat Lawang	36,77
71. Palembang	32,94
72. Prabumulih	30,84
73. Pagaralam	21,07
74. Lubuklinggau	21,42
Sumatera Selatan	31,33

Sumber: BPS, Susenas 2007

Lampiran 9

PERSENTASE PENDUDUK MENURUT SUMBER AIR MINUM (BERPOTENSI TDK HIGINIES), PROV. SUMATERA SELATAN 2005-2007

Kabupaten/Kota	Sumber Air Minum														
	2005					2006					2007				
	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Air Sungai	Air Hujan	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Air Sungai	Air Hujan	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Air Sungai	Air Hujan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1. OKU	35.06	19.52	0.10	18.34	-	35,06	19,52	0,10	18,34	-	33,20	5,08	0,78	6,64	0,78
2. OKI	56.23	11.90	0.85	14.12	5.97	56,23	11,9	0,85	14,12	5,97	45,31	15,63	-	7,81	0,00
3. Muara Enim	56.19	15.82	0.17	9.14	0.64	56,19	15,82	0,17	9,14	0,64	23,44	10,94	-	3,91	0,00
4. Lahat	52.03	16.41	7.67	8.74	-	52,03	16,41	7,67	8,74	-	80,21	8,33	-	-	0,00
5. Musi Rawas	37.59	43.17	0.35	15.10	0.17	37,59	43,17	0,35	15,1	0,17	71,88	9,38	-	15,63	0,00
6. Musi Banyuasin	32.74	29.00	0.73	19.98	9.49	32,74	29	0,73	19,98	9,49	20,31	1,56	-	1,56	9,38
7. Banyuasin	26.86	12.66	0.40	12.19	38.24	26,86	12,66	0,40	12,19	38,24	51,79	11,61	-	1,79	0,00
8. OKU Selatan	32.90	17.76	1.62	26.04	0.18	32,9	17,76	1,62	26,04	0,18	4,17	8,33	27,08	12,50	0,00
9. OKU Timur	71.69	11.48	0.53	10.39	-	71,69	11,48	0,53	10,39	-	54,17	12,50	-	2,08	0,00
10. Ogan Ilir	37.71	9.78	-	31.21	-	39,71	9,78	-	31,21	-	47,92	22,92	-	-	0,00
11. Empat Lawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,63	6,25	-	1,56	0,00
71. Palembang	19.71	4.95	-	6.17	0.53	19,71	4,95	-	6,17	0,53	14,13	4,08	-	2,45	1,49
72. Prabumulih	68.81	10.59	0.17	2.39	-	68,81	10,59	0,17	2,39	-	57,29	12,76	-	0,52	0,52
73. Pagaralm	68.14	5.94	0.23	2.83	-	68,14	5,94	0,23	2,83	-	52,50	5,42	0,42	-	0,00
74. Lubuklinggau	69.99	7.48	0.23	0.41	-	69,99	7,48	0,23	0,41	-	53,41	6,82	0,28	0,57	0,28
Sumatera Selatan	42.50	15.12	1.01	12.64	5.57	42,50	15,12	1,01	12,64	5,57	28,36	6,85	0,40	2,59	1,08

Sumber : BPS Prov. Sumatera Selatan

Lampiran 10

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG JARAK SUMBER AIR MINUMNYA KE PENAMPUNGAN TINJA
KURANG 10 METER DI PROVINSI SUMATERA SELATAN, 2005 – 2007

Kabupaten/ Kota	JARAK SUMBER AIR MINUM KE PENAMPUNGAN TINJA KURANG DARI 10 METER		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Ogan Komering Ulu	26,97	26,97	12,68
2. Ogan Komering Ilir	33,24	33,24	26,23
3. Muara Enim	34,67	34,67	21,92
4. Lahat	16,37	16,37	28,11
5. Musi Rawas	29,85	29,85	39,89
6. Musi Banyuasin	24,79	24,79	23,49
7. Banyuasin	36,52	36,52	10,71
8. OKU Selatan	31,68	31,68	14,99
9. OKU Timur	16,47	16,47	11,82
10. Ogan Ilir	45,45	45,45	24,05
11. Empat Lawang	-	-	28,61
71. Palembang	42,74	42,74	30,11
72. Prabumulih	48,44	48,44	37,62
73. Pagaralm	28,74	28,74	34,15
74. Lubuklinggau	37,53	37,53	47,62
Sumatera Selatan	30,10	30,10	24,58

Sumber : BPS Prov. Sumatera Selatan

Lampiran 11

PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN SANITASI KHUSUS SUMUR TERLINDUNG DAN JARAK AMAN KE PEMBUANGAN TINJA MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN, TAHUN 2007

Kabupaten/ Kota	Sumber Air Minum Sumur Terlindung	Jarak Sumber Air Minum Ke Penampungan Tinja > 10 M
(1)	(2)	(3)
1. Ogan Komering Ulu	33,20	58,39
2. Ogan Komering Ilir	45,31	46,82
3. Muara Enim	23,44	57,80
4. Lahat	80,21	50,07
5. Musi Rawas	71,88	54,93
6. Musi Banyuasin	20,31	70,26
7. Banyuasin	51,79	75,45
8. OKU Selatan	4,17	39,96
9. OKU Timur	54,17	75,95
10. Ogan Ilir	47,92	55,76
11. Empat Lawang	65,63	45,04
71. Palembang	14,13	64,45
72. Prabumulih	57,29	57,27
73. Pagaralam	52,50	42,63
74. Lubuklinggau	53,41	39,98
Sumatera Selatan	28,36	57,87

Sumber : BPS Prov. Sumatera Selatan

